

**PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN KERAJINAN
PERAK SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH**
(Studi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

CANDRA ARYSTA PUTRA P

NIM: (0910310184)



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Tjahjanulin Domai, MS**
- 2. Drs. Suwondo, MS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2014

MOTTO dan PESAN

MOTTO :

“Dalam setiap melangkah gunakanlah akal dan hati, karena akal dan hati akan menuntun kita mengetahui yang benar dan salah, tak lupa juga berdoalah pada Allah SWT karena Allah akan membimbing hambanya untuk terus berjalan di jalannya”.

PESAN :

Dan Terakhir Pesan yang Disampaikan Oleh Papa dan Mama, Seperti yang Ia Kutip Menirukan dari Salah Satu Idola Beliau, Ali Bin Abi Thalib (Ra).

Wahai Anakku! Dunia Ini Bagaikan Samudra Di Mana Banyak Ciptaan Ciptaan Nya Yang Tenggelam. Maka Jelajahilah Dunia Ini Dengan Menyebut Nama Allah. Jadikan Ketakutanmu Pada Allah Sebagai Kapal Kapal Yang Menyelamatkanmu. Kembangkanlah Keimanan Sebagai Layarmu, Logika Sebagai Pelayar Kapalmu, Ilmu Pengetahuan Sebagai Nahkoda Perjalananmu; Dan Kesabaran Sebagai Jangkar Dalam Setiap Badai Cobaan.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan
Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi
Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)

Disusun oleh : Candra Arysta Putra Pradana

NIM : 0910310184

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi :

Malang, 09 Januari 2014

Komisi Pembimbing

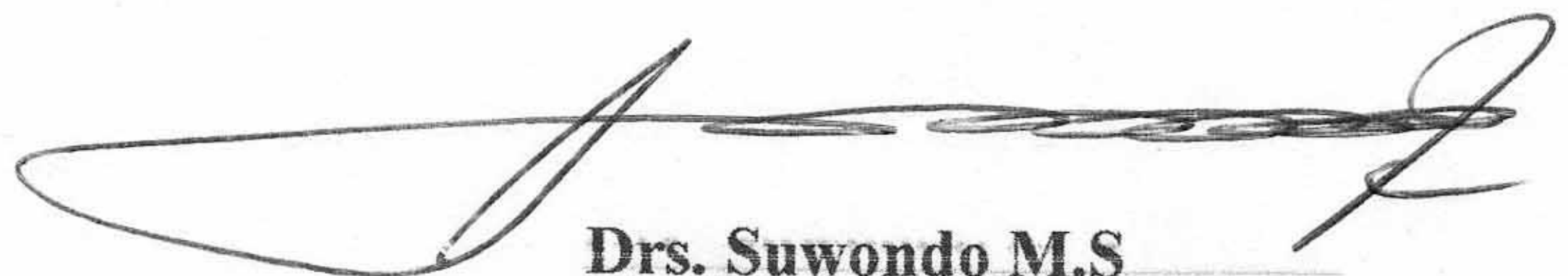
Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Tjahjanulin Domai, MS

NIP. 19531222 198010 1 001



Drs. Suwondo M.S

NIP. 19530201 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Februari 2014
Jam : 08.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Candra Arysta Putra Pradana
Judul : Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam
Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai
Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)

Dan Dinyatakan

Lulus

MAJELIS PENGUJI

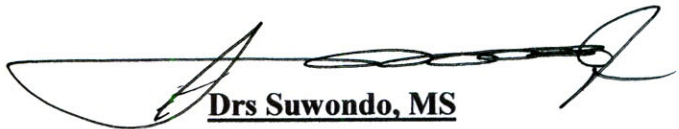
Ketua



Dr Tjahjanulin Domai, MS

NIP. 19531222 198010 1 001

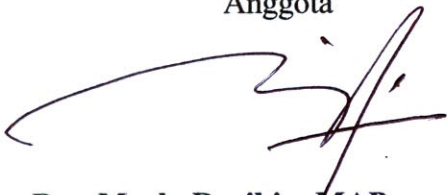
Anggota



Drs Suwondo, MS

NIP. 19530201 198010 1 001

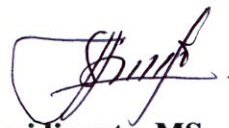
Anggota



Drs, Moch. Rozikin, MAP

NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Drs, Siswidiyanto, MS

NIP. 19600717 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 15 Januari 2014

Mahasiswa



Nama: Candra Arysta Putra P

Nim : 0910310184

RINGKASAN

Pradana, Candra Arysta, 2013, Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Anggota: Drs. Suwondo, MS. (178+XII).

Pemberdayaan yang dilakukan selama ini dengan berbagai bentuk dan variasinya, memiliki tujuan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, karena tujuan utama dari pemberdayaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat, tanpa ada pemberdayaan maka kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang menyangkut kehidupan orang banyak akan menjadi kurang maksimal bahkan bisa berhenti, sehingga bisa menghambat roda perekonomian dari daerah tersebut. Pemberdayaan berperan untuk mengarahkan, melatih, serta mendidik masyarakat agar memiliki pengalaman, pengetahuan serta kreatifitas untuk mengembangkan kehidupannya. Dan kerajinan perak yang terdapat di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto adalah salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga diperlukan adanya campur tangan ataupun peran dari pemerintah terutama pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berusaha untuk melakukan pemberdayaan kepada para pengrajin kerajinan perak untuk mengembangkan misi agar kerajinan perak dapat menjadi produk unggulan daerah.

Dari pemahaman diatas peneliti mencoba untuk mendialogkan berbagai permasalahan yang ada di lapangan dengan menggunakan teori peran pemerintah dalam pemberdayaan, pemberdayaan dan usaha kecil menengah. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah di dalam memberdayakan pengrajin kerajinan perak sebagai bagian pengembangan produk unggulan daerah. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi dan Situs dalam penelitian ini berada Di Desa Batankrajan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Milles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini membahas tentang peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk memberdayakan kerajinan perak sebagai produk unggulan daerah melalui, peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberian pengaturan serta pengendalian usaha. Dalam pemberdayaan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan ini secara positif sangat didukung karena banyak tersedia tenaga kerja, serta persaingan usaha yang relatif masih terbatas. Hambatan dalam pengembangan kerajinan perak ini adalah mahalnya harga bahan baku, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta akses terhadap modal yang masih sangat minim.

Saran dari penelitian ini adalah bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dapat memecahkan masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta adanya keterbatasan modal. Hal tersebut harus diatasi mengadakan lomba desain, diklat dan pelatihan kreatifitas serta memberikan bantuan kredit lunak dengan bunga yang ringan, semuanya dilakukan agar masyarakat khususnya para pengrajin mampu menghasilkan produk yang maksimal baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, untuk mengembangkan kerajinan perak sebagai produk unggulan daerah.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Kerajinan Perak*

SUMMARY

Pradana, Candra Arysta, 2013, Commission Advisor, Chairman: Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Member: Drs. Suwondo, MS. (178+XII Pages).

Empowerment done so far with various shapes and variations, has a goal to direct people's lives for the better, because the main purpose of empowerment is the welfare of the community, without the empowerment of the activities carried out by the community, especially concerning people's lives will be less than the maximum can even stop, so that could inhibit the economy of the region. Empowerment role to direct, to train, and educate the public in order to have the experience, knowledge and creativity to develop life.)

And silver handicrafts which located in the Village Batankrajan, District Gedeg, Mojokerto Regency is one of the activities that able to grow economic activities of society, so we need the intervention or the role of government, especially local government, in this case local government agencies through Department of Industry and Trade Regency Mojokerto trying to empowering the craftsmen to silver handicrafts to develop a mission that silver handicrafts can be a superior product.

from the understanding above the researcher tried to articulate the various problems that exist in the field by using the theory of the government's role in empowerment, empowerment and small and medium enterprises. This is done to determine the extent of the government's role in empowering the silver craftsmen as part of product development in the regions. And then in this study using qualitative method with descriptive approach. The locations and sites in this study were in The Batankrajan village and departments of industry and trade of The Mojokerto Regency. The research was done through observation, interviews, and documentation. Model analysis of the data used by researchers is the model data analysis Milles and Huberman, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion.

The results of this study discusses about the role performed by Mojokerto regency administration, through the Department of Industry and Trade Regency Mojokerto for the empower silver handicrafts as a superior product through the area, increasing the ability financially, development, marketing, human resource development, and administration and control arrangements business. In empowerment by the Department of Industry and Trade is positively strongly supported as much available labor, and competition is still relatively limited. The Barriers in the development of this silver handicrafts is the high price of raw materials, low quality of human resources and access to capital is still very low.

Suggestions from this research is how the Department of Trade and Industry Regency Mojokerto can solve problems related to low quality of human resources, as well as the limitations of capital. This must be resolved by holding design competition, training and creativity training and providing soft loans with mild interest, everything is done so that people, especially the craftsmen are capable of producing the maximum good of the quality and quantity, for the develop silver handicrafts as superior product.

Keywords: *The Role of Government, Empowerment, Silver Handicrafts.*

PERSEMBAHAN :

*Kupersembahkan semua hasil jerih payah penulisan skripsiku ini
untuk*

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Drs. Agus Riyono dan Dra. Siti Choiriyah, karena berkat beliauah penulis dapat menyelesaikan karya ini, pengorbanan, doa serta motivasi yang beliau berikan adalah nyawa bagi penulis untuk selalu semangat dan berusaha menyelesaikan setiap tugas yang penulis emban
2. Adekku Ratna Silvia, Nenekku Sumarlikah, budhe Siti dan Istiqomah, Tante Atin, Mas Agung dan Yudi, Mbak Ayu, Tia, Dewi dan Mbak Lina, dek ovi, raras terima kasih banyak atas motivasi dan doanya, lewat karya ini yang akhirnya dapat aku persembahkan untuk kalian.
3. For someone whom I love with all my heart, Rifa dan Mantanku Chusnul Chotimah terima kasih telah bawelin dan marahin aku supaya segera menyelesaikan karya ini. Bawelan dan marahmu adalah motivasiku. Terima kasih banyak Bawel (Arrigato)
4. Sahabatku Fata Fikrul Islam terima kasih, engkau tidak henti-hentinya selalu membantuku dan terus memberikan masukan untuk terselesainya karya ini. Karya ini tak akan bisa cepat selesai tanpa bantuanmu mas broo.
5. Saudara-saudaraku satu nusa satu bangsa tapi berbeda bahasa, Ana Jauharul, Ariem Saiful Maladewa (Pak Dhe), Hartyas Raditty (Mas Karyo), Langgeng RP, Amri YF, Rochyani Naditya, Hendra Arie Ch, Budhe Rosseri Ayu, Prayuda, King Keni, Lola, Putri Titian, Risky Purwatiningsih, bersama kalian, aku selalu ketawa terus, terima kasih untuk kebersamaannya dan mainan reminya. You're the best
6. Segenap teman-teman jajaran KKK dan Kabinet Medeni: Lutfi, Heru P, Andri Manggala (Kakek), Mbah Inyong alias Mas Farid, Yusuf, Gendut (Gunawan Pamadi),

Karunia Pranata Yudha, Bathara Topiq, Kip Kip Akip, Zulmi Sneijder, Paksi, Dani, Toto, Faisal, Arif, Cahyo, Rangga (Tewuk) dan Teman-teman lain yang maaf belum bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan guyonannya sehingga penulis lebih fresh dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Teman-temanku Fordi Mapelar: Intan Mardiono, Septin Entin, Bagus, Muhsin, Fandi, Candhra, Arki, Fatma, Gio, Mas Togel, Mas Riski, Panji kalian keluarga kedua, terima kasih jalan-jalannya dan semangatnya.
8. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2009, terima kasih atas dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, rahmat, hidayah dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)** dengan baik dan lancar serta tanpa ada halangan yang berarti.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ikhlas bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Drs. Suwondo, MS, selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, memberikan saran.

5. Para dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan dan mengarahkan dalam segala hal.
6. Ibu Mustikawati selaku Kabid Ilmatet Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, terima kasih sudah diberikan izin melakukan penelitian.
7. Bapak Untung selaku staff bidang industri logam dan mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang dengan sabar telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Harjono, selaku Kepala Desa Batankrajan, terima kasih sudah diberikan izin melakukan penelitian di Desa Batankrajan.
9. Ibu sutriani selaku Kasi Pemerintahan Desa Batankrajan, terima kasih telah memberikan informasi terkait pemberdayaan kerajinan perak di Desa Batankrajan.
10. Bapak Purbo dan Rohman selaku pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan terima kasih atas segala informasi yang bapak berikan.

Dengan keterbatasan dan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik serta masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi semua pihak.

Malang, 29 Januari 2014

Candra Arysta Putra P

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PESAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemerintah Daerah	12
1. Pengertian Pemerintah Daerah	12
2. Pengertian Perangkat Daerah	13
3. Struktur dan Fungsi Institusi Pemerintah Daerah	16
B. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan	19
C. Pemberdayaan.....	22
1. Pengertian Pemberdayaan	22
2. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan	24
3. Strategi Pemberdayaan	25
D. Usaha Kecil Menengah.....	27
1. Definisi UKM	27
2. Karakteristik UKM	28
3. Potensi UKM	30
4. Masalah Yang Dihadapi UKM	31

5. Upaya Pengembangan UKM	36
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	41
C. Lokasi Dan Situs Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	48
G. Analisa Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian	54
1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto	54
a. Sejarah Kabupaten Mojokerto.....	54
b. Keadaan Geografis dan Topografis Kabupaten Mojokerto.....	57
c. Jumlah Penduduk	59
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	61
a.) Visi Dan Misi Disperindag Kabupaten Mojokerto	65
b.) Tujuan dan Sasaran Disperindag.....	68
3. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	71
a. Lokasi.....	71
b. Jumlah Penduduk	72
c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto	72
d. Awal Mula Desa Batankrajan Sebagai Sentra Kerajinan Perak.....	73
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	74
1. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Mojokerto	74
a. Peningkatan Kemampuan Finansial	76
b. Pengembangan Pemasaran	80
• Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar	80
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	83
d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha.....	88
1. Peningkatan Kemudahan Dalam Layanan Perijinan.....	88
2. Penguatan Kelembagaan	90
2. Keberdayaan UKM Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.....	96
a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin	96
b. Pemasaran Hasil Usaha	101
c. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap.....	106
3. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Agar Mampu Menjadikan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah	112
1. Faktor Pendukung	112
a. Tenaga Kerja Yang Cukup Banyak.....	112
b. Masih Belum Banyak Pesaing Yang Memiliki Usaha Yang sama	114

2. Faktor Penghambat	115
a. Mahalnya Harga Bahan Baku	115
b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	115
c. Terbatasnya Modal	116
C. Pembahasan	114
1. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Mojokerto.....	117
a. Peningkatan Kemampuan Finansial	119
b. Pengembangan Pemasaran	122
• Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar	122
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	124
d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha	127
1. Peningkatan Kemudahan Dalam Layanan Perijinan.....	127
2. Penguatan Kelembagaan	129
2. Keberdayaan UKM Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto	132
a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin	135
b. Pemasaran Hasil Usaha	137
c. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	141
3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Agar Mampu Menjadikan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah	143
1. Faktor Pendukung	144
a. Tenaga Kerja Yang Cukup Banyak	144
b. Masih Belum Banyak Pesaing Yang Memiliki Usaha Yang Sama	146
2. Faktor Penghambat	148
a. Mahalnya Harga Bahan Baku	148
b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	149
c. Terbatasnya Modal	150

BAB V KESIMPULAN

a. Kesimpulan	152
b. Saran	155

Daftar Pustaka	157
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel.	Judul	Halaman
1.	Bagian Pokok Organisasi Pemerintah Daerah	19
2.	Tinggi dan Luas Menurut Kecamatan.....	58
3.	Jumlah Penduduk Tahun 2009 - 2011.....	60
4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	60
5.	Keadaan Perekonomian/Mata Pencaharian Tahun 2013.....	72
6.	Status Kepemilikan Industri	73
7.	Penguatan Kelembagaan Pengrajin Kerajinan Perak	94
8.	Omset Pengrajin Kerajinan Perak tahun 2012	98
9.	Data Tingkat Pemasaran Kerajinan Perak Th 2012	103
10.	Jumlah Tenaga Kerja Kerajinan Perak Th. 2012	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar.	Judul	Halaman
1.	Bagian Pokok Pembentuk Struktur dan Fungsi.....	17
2.	Model Analisis Data Kualitatif.....	51
3.	Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto	61
4.	Mesin Elektroplating.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

NO.	Judul	Jumlah Halaman
1.	Interview Guide.....	4
2.	Daftar Riwayat Hidup	1
3.	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bakesbangpol Mojokerto	3
4.	Surat Ijin penelitian dari Desa Batankrajan	3
5.	Proposal Pengembangan IKM KUB Majapahit Jewelry.....	5



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan pengangguran bukanlah dua hal yang saling terpisah. Keduanya dihubungkan oleh sebab akibat yang saling memengaruhi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Kemiskinan tidak muncul begitu saja namun ada sebab-sebabnya dalam hal ini Kuncoro (2003:131), mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yang dipandang dari tiga hal, yaitu:

1. Dari sudut pandang mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upaya juga rendah. Rendahnya, kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
3. kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Masalah kemiskinan di Indonesia adalah merupakan masalah kompleks dan bersifat multi dimensi. Mengingat kompleksnya permasalahan kemiskinan ini, diperlukan pengetahuan yang memadai dalam memahami akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi. Selama ini, kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena lebih bersifat “proyek” dan “Bantuan” sehingga ada suatu kesan memanjakan masyarakat. Lebih lanjut, ditengarai bahwa kegagalan penanggulangan

kemiskinan diduga akibat kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri.

Akar permasalahan kemiskinan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan Pemenuhan Hak Dasar
 - a. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan
 - b. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan
 - c. Terbatasnya Akses dan Rendahnya Mutu Layanan Pendidikan
 - d. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha
 - e. Terbatasnya Akses Layanan Perumahan
 - f. Terbatasnya Akses Terhadap Air Bersih dan Aman, Serta Sanitasi
 - g. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah
 - h. Memburuknya Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 - i. Lemahnya Jaminan Rasa Aman
 - j. Lemahnya Partisipasi
2. Lemahnya Penanganan Masalah kependudukan
3. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender
4. Kesenjangan Antar Daerah
(Eko Dermawan, 2011. <http://kpmbwi.blogspot.com/2012/08/akar-penyebab-dan-permasalahan.html>)

Dari akar permasalahan diatas bisa dilihat bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah terkait kesempatan kerja, memang dewasa ini gejala sosial diakibatkan oleh pemenuhan akan kebutuhan ini, para angkatan kerja yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila permasalahan ini tidak segera diatasi, jumlah pengangguran serta kemiskinan tentunya akan semakin bertambah.

Di era otonomi daerah dewasa ini, sejatinya daerah harus memainkan perannya yang lebih signifikan untuk membentuk kemandirian lokal, konsepsi kemandirian lokal sebagaimana yang diungkapkan oleh (Takdir, 2012:75),

“Sebagai sintesis wawasan baru, yang memiliki acuan paradigma, yakni *human development* (HD) sebagai jalan untuk mewujudkan interkoneksi-integralitas konsepsi pembangunan yang ditawarkan”.

Dengan kata lain, kemandirian lokal adalah menekankan perlunya setiap entitas memelihara dan meningkatkan kualitas kemandirian demi menjaga keberlangsungan konsepsi sebuah pembangunan secara egaliter dan integral. Kemandirian lokal lebih memposisikan dirinya pada tatanan sebagai entitas organik yang tersusun secara sistematis. Namun, tatanan seperti itu, harus bisa dikorelasikan dengan kebutuhan yang mendasar karena tatanan dalam sebuah pembangunan sistem bisa menjaga kemandirian di tengah ketergantungan dan keterbatasan pada potensi-potensi lokal.

Bila mengacu pada konsepsi kemandirian lokal, peningkatan hidup bangsa untuk menuju Indonesia mandiri akan bisa direalisasikan. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap mempertahankan potensi-potensi lokal agar bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Ketika konsepsi kemandirian lokal bisa menjamin pertumbuhan dan pengembangan pembangunan nasional utamanya untuk mengatasi pengangguran serta kemiskinan, tentu cita-cita luhur bangsa untuk memberdayakan masyarakat kecil bukan persoalan yang sulit dilakukan. Bahkan, hal itu bisa memperkuat tatanan ekonomi yang meniscayakan suatu perubahan paradigma dalam mengupayakan nilai idealitas dari suatu pembangunan, yaitu pemberdayaan (*empowerment*) dan peningkatan (*improvement*) produktivitas dalam negeri sehingga permasalahan-permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan tidak sering muncul kepermukaan.

Pemberdayaan adalah tugas yang harus diemban oleh pemerintah, pemberdayaan dilakukan untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan potensinya. Dengan basis kemandirian lokal serta adanya pemberdayaan dari pemerintah, maka diharapkan untuk terjadi sinergi yang

positif dan berkesinambungan untuk keluar dari gejala-gejala sosial tersebut, namun pelaksanaan dalam tataran teoritis di lapangan tidak semudah itu, tidak hanya pemerintah yang berperan, masyarakat juga harus memiliki kreatifitas untuk membangun perekonomiannya.

Dalam konteks ini penting sekali untuk menekankan kepada masyarakat bahwa pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, karena dengan hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan untuk mereka, serta mengembangkan inovasi-inovasi mereka untuk secara mandiri berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk usaha kecil dan menengah (UKM), karena keberadaan pengusaha kecil dan menengah termasuk yang berskala mikro, serta koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan sektor tersebut sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Dalam mewujudkan pengembangan usaha nasional, usaha kecil perlu dibina menjadi usaha menengah yang makin efisien dan mampu berkembang secara mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan diharapkan makin mampu meningkatkan peranan dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen, baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Serta yang tak kalah penting diperlukan kemampuan dan keahlian dari setiap pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan memiliki produk yang berdaya saing agar usaha kecil dan menengah bisa tetap eksis sehingga dapat menghasilkan nilai tambah

yang tinggi untuk mampu memberikan sumbangan yang besar dan menjadi Produk unggulan Daerah sebagai bentuk kemandirian lokal .

Kemandirian lokal, melalui pengembangan produk unggulan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah karena dari produk unggulan tersebut mampu mengangkat martabat suatu daerah yang berdampak pada peningkatan sumber keuangan daerah. Proses untuk membuat suatu produk menjadi produk unggulan daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulan terutama yang berasal dari sektor usaha kecil menengah sebagai proses pengembangan sumber daya lokal dan optimalisasi atas potensi ekonomi daerah. Sebagai suatu strategi peningkatan pendapatan daerah, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap bahwa suatu daerah yang menerapkan pola seperti ini relatif lebih “mandiri” dalam pengembangan ekonominya.

Semangat otonomi daerah yang menimbulkan persaingan antar daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi khususnya pengembangan produk unggulan. Hal ini seperti yang terjadi pada salah satu sentra usaha kecil menengah industri kerajinan perak di desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan penyerapan tenaga kerjanya maka industri kerajinan perak dapat digolongkan dalam industri padat karya, dimana industri pengolahan ini pada umumnya tidak membutuhkan peralatan yang mahal dan hanya mengandalkan kemampuan dan keahlian dari pengrajin itu sendiri.

“Berdasarkan arah kebijakan pengembangan klaster industri perak dari kemenperin dijelaskan bahwa dari sentra industri perak jawa timur mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 17.600 orang dengan kontribusi produksi sebesar 25 % dari nilai ekspor nasional. Selain itu industri kerajinan perak

ini mampu diekspor dengan tujuan Amerika Serikat, Hongkong, India, UAE, Singapura, Jepang, Italia, Jerman, Perancis, Norwegia, Australia, Inggris, dll. Dengan pangsa pasar yang menjanjikan sudah sepatutnya agar industri ini bisa dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan” (www.Rocana.kemenperin.go.id/30 Januari 2013/“pelaksanaan kebijakan industri di Jatim”).

Keberadaan industri kerajinan perak di Kabupaten Mojokerto ini sejatinya sangat bergantung kepada kondisi pasar. Apabila kondisi pasar mendukung maka perlu terus ditopang oleh kelancaran dari bahan baku. Keberadaan perak di pasaran saat ini adalah pasang surut disamping semakin meningkatnya kebutuhan baku perak untuk pemenuhan kapasitas industri.

“Sejak tahun 2009 harga bahan baku perak semakin melonjak dari Rp 7,5 juta per kilogram hingga Rp 11,5 juta per kilogram, bahkan sekarang ini harganya naik lagi menjadi Rp 12,5 juta per kilogram. Akibat lonjakan harga bahan baku perak yang terus melambung, maka perajin perak dengan modal 1,5-2,5 kilogram perak terpaksa gulung tikar. Disamping masalah harga bahan baku juga dikarenakan banyak pemilik toko ataupun *art shop* di Bali yang menghentikan pesanan barang karena kesulitan menjual barang perhiasan perak” (www.Nasional.kompas.com/read/05 februari 2013).

Kerajinan perak yang telah dianggap sebagai komoditi yang bisa diandalkan untuk peningkatan sumber keuangan daerah dalam pengelolaannya masih belum optimal. Hal itu dikarenakan pengelolaan terhadap kerajinan perak yang dilakukan oleh pengrajin perak di Indonesia khususnya Mojokerto pada umumnya masih bersifat menggunakan alat sederhana dan pemahaman pengrajin yang masih kurang mengenai model-model yang saat ini sedang tren di pasar baik domestik maupun global. Disamping itu permasalahan mengenai kualitas pekerjaan yang sering dihadapi di lapangan membuat para pembeli asing menolak dan mengurungkan niat memesan dari pengrajin perak karena tidak mempunyai kualitas yang maksimal. Permasalahan seperti demikian juga terjadi pada industri kerajinan perak di daerah Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Pra Riset yang dilakukan penulis terhadap salah satu pemilik UKM Agung Silver yakni Bapak Purbo diketahui bahwa adanya berbagai macam permasalahan dalam industri kerajinan perak di daerah Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ini antara lain :

“Terjadinya peristiwa Bom Bali 1 dan 2 yang menggemparkan seluruh dunia dan menewaskan warga-warga asing membuat turis enggan berlibur di Bali sehingga hal itu berdampak pada pengrajin perak di desa Batankrajan, Mojokerto. Dampaknya adalah semakin banyaknya toko kerajinan perak di Bali yang gulung tikar sehingga berakibat pada semakin sulitnya memasarkan hasil kerajinan mereka. Disamping itu permasalahan lainnya yaitu adanya desain yang stagnan dan kurang berkembang sehingga menyebabkan penurunan produksi, akibatnya banyak produk-produk mereka yang hanya dijual kepada toko-toko perhiasan di pasar dan diberi harga murah”.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Rochman selaku pengurus dan pengrajin di Desa Batankrajan bahwa:

“Kami sebagai pengrajin selalu saja terbatas oleh akses pemasaran dan kebanyakan dari kita memasarkan di wilayah lokal saja, ditambah semakin mahalnya harga baku dan penentuan desain yang stagnan membuat konsumen semakin menjauh dari kami”.

Dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi pengrajin kerajinan perak di daerah Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto maka perlu adanya suatu peran dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto secara optimal. Peran pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi pengrajin kerajinan perak dalam hal memberi jalan dan sebagai distributor produk kerajinan perak. Selain itu juga diharapkan adanya pemberian alat-alat modern dan pemberian pelatihan-pelatihan terkait desain yang nantinya dapat meningkatkan proses produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu langkah konkrit yang dapat diambil oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi kondisi tersebut adalah

dengan melakukan pemberdayaan terhadap pengrajin kerajinan perak. Usaha pemberdayaan secara berkelanjutan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sangat penting dilakukan, hal ini mengingat pada upaya untuk menjadikan kerajinan perak sebagai salah satu produk unggulan dari Mojokerto.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai seberapa besar peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pemberdayaan terhadap para pengrajin kerajinan perak. Maka dari itu penulis mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk judul,

“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas terbatas hanya kepada masalah yang berkaitan dengan peran dan kebijakan pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Mojokerto dan mampu menjadikan perak sebagai produk unggulan daerah. Oleh karena itu pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah :

1. Bagaimanakah peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap pengrajin

kerajinan perak agar mampu menjadikan kerajinan perak sebagai salah satu produk unggulan daerah ?

2. Bagaimanakah keberdayaan UKM yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto?
3. Hal apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak di daerah Batankrajan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap pengrajin kerajinan perak agar mampu menjadikan kerajinan perak sebagai salah satu produk unggulan daerah.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai keberdayaan yang telah diperoleh setelah dilaksanakan proses pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak di daerah Batankrajan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil kegiatan penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis :

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam melaksanakan Pemberdayaan terhadap pengrajin Perak agar mampu menjadikan kerajinan perak sebagai komoditi utama yang mampu menembus pasar dunia internasional dan mampu menjadi produk unggulan daerah

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik khususnya yang berkaitan dengan teori pemberdayaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak sebagai produk unggulan daerah, sehingga dikemudian hari akan lahir inovasi terkait pemberdayaan yang mampu mengatasi permasalahan sosial, dan memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun terhadap lingkungan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung pelaksanaan penelitian. Penjelasan mengenai definisi dan batasan-batasan pengertian yang digunakan peneliti dapat dilihat pada bab ini.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan dan memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data dan jenis, teknik pengumpulan data, instrumen data, dan metode analisis.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan pengrajin kerajinan perak agar mampu menghasilkan kerajinan perak yang nantinya dapat menjadi produk unggulan daerah di Kabupaten Mojokerto yang kemudian disertai analisis yang mendalam terhadap permasalahan tersebut berdasarkan teori-teori yang berkaitan, serta diperkuat dengan informasi yang didapat langsung dari wawancara mendalam dengan aparat/pejabat, pengusaha dan pekerja di sentra terkait.

Bab V : PENUTUP

menguraikan tentang kesimpulan yang telah dibahas dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis dari masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia seringkali diistilahkan sebagai *local government* sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaho dalam (Jimung, 2005:40) yang mengartikan *local government* sebagai

“bagian dari pemerintah suatu Negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan Undang – Undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di wilayah kekuasaannya”.

Sedangkan menurut Hoessin dalam (Muluk, 2005:10) mengemukakan bahwa *local government* merupakan konsep yang mengandung 3 arti, yaitu :

1. Berarti pemerintah lokal yang seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah
2. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pemerintah lokal (mengacu pada fungsi)
3. Bermakna daerah otonom

Perlu diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban (sebagai daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Seperti yang tercantum dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah pasal 1 ayat 8 adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa. Organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perangkat daerah dibentuk oleh daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi perangkat daerah dengan Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, kelembagaan fungsi staf dan lini pendukung yang tegas, efisien, dan efektivitas yang jelas. Hal ini dimaksudkan sebagai pemberian arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional kepada daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari:

- a. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat.
- b. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat.

- c. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan.
- d. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
- e. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dimana yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
(<http://www.wikipedia.org/>)

Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan-kebutuhan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.

Perangkat daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, implementasi penataan lembaga perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi

ini serta fungsi pendukung secara efisien dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

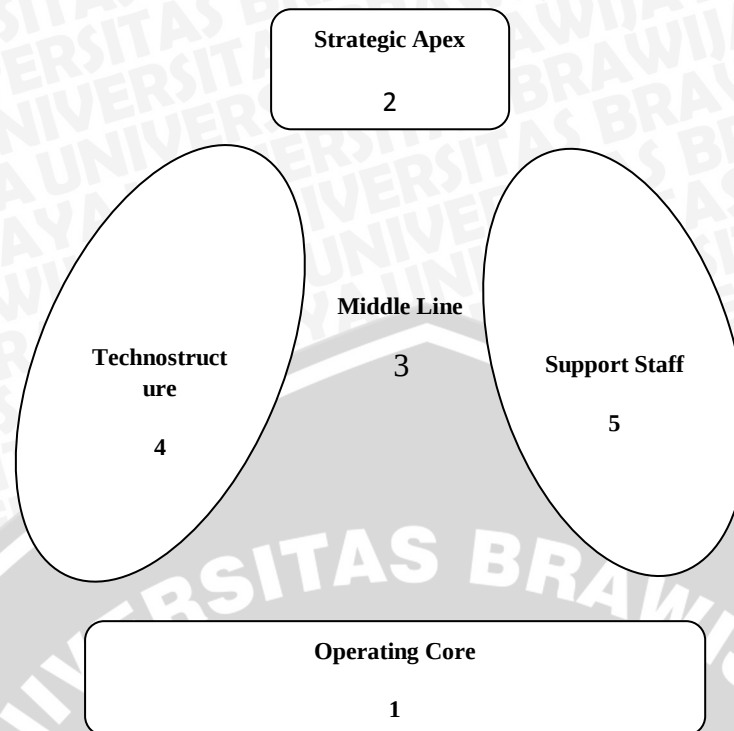
Sesuai dengan kebijakan PP No. 41 Tahun 2007, perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur, bupati atau walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi sekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, dan inspektorat kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- e. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
- f. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- g. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus daerah.
- h. Kecamatan merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- i. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan, kelurahan dipimpin oleh lurah.

3. Struktur dan Fungsi Institusi Pemerintah Daerah

Dalam organisasi atau institusi khususnya pada organisasi perangkat daerah memiliki lima bagian pokok pembentuknya dimana setiap bagian memiliki hubungan dengan bagian yang lain. Lima bagian pokok dalam organisasi yaitu:



Gambar 1 Bagian Pokok Pembentuk Struktur dan Fungsi

Sumber : Mintzberg dalam (Robbins, 1994:304)

Fungsi pokok institusi dalam Mintzberg dalam (Robbins, 1994:304):

1. *The Operating Core*

Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Jika kontrol berada di *operating core*, maka keputusan akan di desentralisasi. Hal ini menciptakan birokrasi professional.

2. *The Strategic Apex*

Manajer tingkat puncak, yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu. Jika *strategic apex* yang dominan, maka kontrol desentralisasi dan organisasi tersebut merupakan struktur yang sederhana.

3. *The Middle Line*

Para manajer yang menjadi penghubung *operating core* dengan *strategic apex*. Jika *middle management* yang mengontrol, maka anda akan menemukan kelompok dari unit otonomi yang bekerja dalam sebuah struktur divisional.

4. *The Technostructure*

Para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Jika para analisis dalam *technostructure* yang dominan, kontrol akan dilakukan melalui standarisasi, dan struktur yang dihasilkan adalah sebuah birokrasi mesin. Akhirnya, dalam situasi di mana staf pendukung yang mengatur, maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama (*mutual adjustment*)

5. *The Support Staff*

Orang-orang yang mengisi unit staf, yang member jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Di dalam organisasi pemerintah daerah ke lima unit pokok di atas dapat diklasifikasikan menurut bagian di dalam organisasi perangkat daerah. Tabel di bawah ini merupakan pengelompokan bagian pokok organisasi perangkat daerah berdasarkan lima unit pokok diatas.

Tabel 1

Bagian Pokok Organisasi Pemerintah Daerah

NO	Bagian	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Strategic Apex	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah DPRD
2.	The Middle Line	Sekretaris Daerah Asisten Daerah
3.	The Technostructure	Lembaga teknis Daerah
4.	The Operating Core	Dinas Daerah Kecamatan Kelurahan
5.	The Support Staff	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Sekretariat Dinas Sekretariat Lembaga Teknis Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kelurahan

Sumber: RKPD Kabupaten Mojokerto 2013

Dengan melihat data tentang organisasi perangkat daerah diatas maka terlihat bahwa terdapat pemfokusan bagian di dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah. Pemerintah daerah memiliki lembaga teknis di dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Mojokerto yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan memperhatikan relevansi dengan judul dan situs penelitian maka di dalam penelitian ini difokuskan pada birokrasi yang mengurus manajemen perindustrian dan perdagangan

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Tahap yang pertama dari setiap organisasi yang tertarik dalam pemerintah daerah adalah bagaimana menentukan peran yang akan dilakukan oleh pemerintah

itu sendiri. Pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah hendaknya selalu berada didepan dalam memberikan penghargaan dan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah dalam hal ini bertindak menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta seperti jalan raya, keadilan, keamanan dan pemberdayaan usaha kecil menengah.

Menurut arsyad (1999:120) ada 4 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu :

- a. Sebagai *entrepreneur*, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis.
- b. Sebagai *coordinator*, bahwa pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi.
- c. Sebagai fasilitator, bahwa pemerintahan daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) didaerahnya.
- d. Sebagai *stimulator*, bahwa pemerintahan daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

Peran pemerintah lokal dalam hal ini perlu juga didukung oleh partisipasi masyarakat, karena jika tidak maka tujuan dari pemerintah tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Adapun disini peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dapat diwujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014 dengan fokus penguatan dan penumbuhan sektor industri. Oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pola pemberdayaan yang terkait dengan pengembangan industri kecil menengah (www.mojokertokab.go.id).

Menurut Tohar (2002:163) dalam mewujudkan akses atau kemudahan bagi pengembangan usaha kecil menengah, pemerintah telah berupaya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melancarkan program-program pelatihan

misalnya pelatihan motivasi dengan metode *achievement*, motivation training. Pelatihan ini bertujuan untuk membangkitkan etos kerja/teknik produksi, pemasaran, administrasi usaha, promosi pemasaran. Pada saat ini pemerintah daerah berupaya lebih menggambarkan usaha industri kecil yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan.

Sedangkan peran disini yang akan diterapkan dalam upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM menurut Sjaifudin (1995:66-75) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan Finansial

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui “penyertaan modal sementara”.

2. Pengembangan Pemasaran

Pada era pasar bebas seperti saat ini dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional, hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga cara strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar

Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan (*vertical*) subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak ini memberi manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang juga modal.

- b. Proteksi pasar

Bentuk proteksi yang dilakukan adalah melalui konsumsi. Sekitar hanya 10% dari total anggaran pemerintah yang digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan usaha kecil.

- c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Persaingan

Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini adalah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi *infrant industries* mendorong terciptanya iklim persaingan dan reorientasi lembaga koperasi kearah bisnis. Dalam konteks ini fungsi kontrol sangat diperlukan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dunia pendidikan dengan

pasar kerja melalui sistem pemagangan (*link and match*) serta pemberian insentif bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk pengembangan SDM dan teknologi.

4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian

a. Pengaturan dan Perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada empat jenis perijinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha kecil yaitu ijin tempat usaha, kelayakan usaha, lokasi serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, ijin usaha industri serta ijin perdagangan.

b. Perencanaan Tata Ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui: (1) pelibatan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan, (2) proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, (3) pengakuan sungguh-sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil bagi lingkungan masyarakat.

c. Fungsi Kelembagaan

Dalam hal ini instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan inisiatif untuk mengembangkan usaha kecil serta terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan” adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan barat, utamanya Eropa. memahami konsep *empowerment* secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Friedman (1992) dalam (Hadi, 2006:2) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan atau *empowerment* memiliki dua kecenderungan antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan, kemandirian mereka melalui organisasi. Dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi,

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Pemberdayaan menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar (*bargaining*) lapisan bawah (masyarakat) terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Eko:2002). Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab Negara. Pemberian layanan publik kepada masyarakat tentu merupakan tugas Negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan memiliki makna terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri. (Eko: 2002).

Sebelum diterapkannya otonomi daerah, segala macam kebijakan yang diterapkan di daerah merupakan hasil dan produk dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah cenderung hanya mengikuti dan tidak memiliki inovasi. Padahal situasi, kondisi serta potensi yang dimiliki tiap-

tiap daerah tidaklah sama dengan yang ada di pusat. Oleh karena itu setelah adanya otonomi daerah, maka diharapkan dapat lebih memacu proses pembangunan yang ada karena sudah paham akan potensi daerahnya masing-masing, demikian pula terkait kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya pengrajin perak. Dengan demikian, para pengusaha kecil dan menengah seperti pengrajin dapat ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan usahanya.

Pemberdayaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan dan saling memiliki keterkaitan. Dalam setiap proses pembangunan akan terjadi juga proses pemberdayaan, khususnya masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah. Hal ini dimaksudkan agar nantinya masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru. Pembangunan akan berkembang secara dinamis berdasar kemampuan dan kekuatan masyarakat sendiri, dalam rangka menumbuhkan usaha industrinya. Bila masyarakat telah tumbuh dan berdaya, maka pembangunan akan berakar kuat pada rakyat, sehingga akan makin kuat dan kokoh menyangga pembangunan serta perekonomian di bangsa ini.

2. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996:74) dilakukan melalui

3 arah yaitu:

- 1) Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan
- 2) Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
- 3) Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-

pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemikiran kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Ketiga arah pemberdayaan diatas berpangkal pada 2 sasaran utama yaitu:

- 1) Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan
- 2) Untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan
(Sumodiningrat : 1996)

Untuk sampai pada ketiga sasaran di atas maka proses pemberdayaan masyarakat industri kecil dan UKM menurut Prijono dan Pranarka (1996:2) dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah
- 2) Fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukan bagi rakyat.
- 3) Fase emansipatoris, proses pemberdayaan ini berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan di dukung oleh pemerintah bersama masyarakat.

Pada fase emansipatoris ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasi diri, kegiatan pemberdayaan terhadap industri kecil dan UKM seperti pengrajin perak telah mencapai puncaknya.

3. Strategi Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan terhadap UKM khususnya pengrajin perak maka diperlukannya adanya strategi dalam pemberdayaan. Berbagai

pendekatan yang mungkin dapat diterapkan dalam pemberdayaan industri kecil dan UKM seperti yang diungkapkan Kartasmita (1996:107) antara lain:

1. Upaya pemberdayaan yang terarah atau pemihakan kepada yang lemah
2. Pendekatan kelompok untuk memudahkan dalam pemecahan masalah secara bersama-sama
3. Pendampingan, selama proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping khususnya pemerintah daerah. Yang berfungsi sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator serta membentuk kelompok mencari solusi atas masalah yang dihadapi

Sedangkan menurut Elliot dalam (Riyadi dan Supriady, 2004:80) menjelaskan bahwa pemberdayaan atau *empowerment* dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu :

1. *The Welfare State*
Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. *The Development Approach*
Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya.
3. *The Empowerment Approach*
Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan serta melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Untuk pelaksanaan pemberdayaan yang baik dalam hal ini maka pasti memerlukan suatu strategi yang baik, yang nantinya selama proses kegiatan berlangsung materi-materi yang akan disampaikan dapat diterima secara utuh dan memberikan respon positif bagi para pengusaha dalam rangka mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan bukan hanya dilaksanakan secara kolektif namun juga dapat dilakukan secara individual, meskipun nantinya strategi ini akan tetap berkaitan

dengan kolektivitas dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Menurut Tambunan (2000:81) strategi yang konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil, antara lain :

- a. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi makro
- b. Peningkatan integrasi yang kuat, baik antar sesama usaha industri kecil maupun antar usaha menengah besar melalui kebijakan *bussines allianie*
- c. Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan *entepreneurship* dan kemampuan penguasaan tekhnologi.

Dengan memperhatikan strategi-strategi yang dipaparkan di atas, maka diharapkan upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

D. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Definisi UKM

Menurut Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 yang dimaksud Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

BPS dalam hal ini membagi jenis-jenis UKM berdasarkan besarnya jumlah pekerja, yaitu : (a) kerajinan rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja dibawah tiga orang termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar, (b) usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5-9 orang, (c) usaha menengah sebanyak 20-99.

Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- 3) Milik Warga Negara Indonesia (WNI)
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- 5) Berbentuk usaha orang-perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dalam mendefinisikan mengenai UKM dapat ditinjau dari sudut pandang misalnya dari segi jumlah tenaga kerja dan aset yang dimiliki. Akan tetapi perbedaan tersebut dirasakan wajar sepanjang tidak menyimpang dari karakteristik UKM.

2. Karakteristik UKM

Di lihat dari segi hukum, UKM saat ini tengah pada posisi yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan, tidak berakta notaris. Adapun jika ditinjau dari segi ekonomi keberadaan UKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar, hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang terorganisir. Para pengusaha kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi yang lain sebagai kekuatan untuk menggalang kekuatan bersama.

Namun walaupun demikian UKM di Indonesia masih mampu bertahan hal itu dikarenakan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama.
2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha.
3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja.
4. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

Untuk memahami lagi penjelasan diatas maka dalam hal ini juga diperlukan pemahaman mengenai karakteristik Usaha Kecil. Karakteristik usaha kecil tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus terapan (Anoraga dan Sudantoko, 2002:225).

Sedangkan karakteristik UKM secara umum yaitu mereka lebih suka bekerja sendiri-sendiri atau bahkan saling mematikan. Koperasi yang diharapkan oleh pemerintah sebagai salah satu wahana pembinaan UKM tampaknya kurang berjalan, karena hanya sebagian kecil dari pengusaha yang menggunakan jasa pelayanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh koperasi. Aspek lain yang juga melekat pada UKM yaitu rendahnya kualitas SDM sehingga menjadi salah satu penyebab sulitnya bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas.

3. Potensi UKM

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan yang penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (*establishment*) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Dari segi penciptaan lapangan kerja industri kecil ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar dengan menggunakan sumber daya lokal dan usahanya relatif fleksibel. Sedangkan jika ditinjau dari segi jumlah usaha (*establishment*), UKM memainkan peran dinamis yang potensial dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru dan meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. UKM juga memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong ekspor non migas di Indonesia.

Bahkan telah ada kebijakan-kebijakan khusus yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di masa lalu, seperti perlindungan terhadap impor untuk produk tertentu, perlindungan kategori investasi untuk perusahaan-perusahaan kecil, skema kredit, dorongan moral bagi perusahaan besar untuk mendukung perusahaan kecil misalnya program bapak angkat, dan sikap selektif pemerintah dalam berkontak (Triyuwono dan Yustika, 2003:75)

Berdasarkan hasil survey dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa kontribusi UKM terhadap PDB pada tahun 2009 tercatat sebesar 53, 32 % dan pada tahun 2011 kontribusi meningkat menjadi 56,5 %. Disamping itu jumlah UKM di tahun 2011 menembus angka 55, 21 juta unit. Dengan proporsi usaha kecil sebanyak 609.195 unit, sedangkan usaha menengah menyumbang 44.280 unit (sumber:ekonomi.kompasiana.com).

Walaupun jika melihat data diatas peran dan kontribusi UKM mengalami kenaikan pertumbuhan akan tetapi kondisi UKM masih tetap rawan pada keberpihakan bank yang rendah, pasar bebas yang sudah dibuka serta terbatasnya kebijakan pemerintah yang memihak pada sektor usaha kecil. Oleh karena itu untuk tetap meningkatkan pertumbuhan UKM di tahun-tahun selanjutnya maka diperlukan adanya keikutsertaan beberapa stakeholder yang terlibat dalam pertumbuhan UKM ini.

4. Masalah Yang Dihadapi UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar

yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Namun UKM pada umumnya juga mempunyai permasalahan-permasalahan antara lain seperti yang dikemukakan oleh Jafar (2004:41):

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara

lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

B. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya

serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan

usahanya yang disebabkan karena mahalnnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

5. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

6. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

5. Upaya Pengembangan UKM

Pengembangan UKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal berikut :

a. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan

Pemerintah perlu memperluas pemberian kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan UKM. Untuk membantu meningkatkan modalnya baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan lembaga keuangan mikro yang ada maupun non bank. Yang harus dilakukan

sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan UKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini UKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

c. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM atau antara UKM dengan pengusaha besar didalam negeri maupun luar negeri untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya baik didalam maupun di luar negeri.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik didalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilannya dalam mengembangkan usahanya. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan upaya penumbuhkembangan UKM yang juga berfungsi dalam mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

h. Mengembangkan Promosi

Agar lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu juga perlu diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

i. Mengembangkan Kerjasama Yang Setara

j. Perlu Adanya Kerja Sama Yang Serasi Antara Pemerintah Dengan Dunia Usaha sebagai langkah untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha (Tambunan, 2000:121).

Berdasarkan keterangan diatas maka upaya mengenai pengembangan UKM tersebut sangat penting dalam meminimalisir kendala-kendala yang akan menghambat pencapaian tujuan pengembangan UKM. Pada pelaksanaan pengembangan UKM tersebut diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan pengusaha UKM. Hal ini diperlukan karena dalam kenyataannya di lapangan masih ditemukannya beberapa kendala mengenai keterkaitan perbedaan persepsi

antara pemerintah dan pengusaha UKM yang tentunya dalam hal ini nantinya akan dapat merugikan kedua belah pihak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian, dimana penulis dapat menentukan secara pasti kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa metode memiliki arti sebagai “cara yang tersusun dan teratur, untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal Ilmu pengetahuan” (Daryanto, 1997:439).

Sedangkan penelitian menurut Singarimbun dan Efendi (1987:8) yaitu “Suatu proses panjang, yang berasal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan teori, konseptualitas, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya”. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu cara, strategi, taktik, siasat yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk memahami fenomena dengan cara menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran fenomena yang bersangkutan dengan metode-metode ilmiah dalam rangka membuat suatu verifikasi/kesimpulan untuk menemukan solusi. Jadi metode penelitian memuat beberapa tahapan yaitu:

A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Definisi penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2008:4) dijelaskan sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Memperkuat pernyataan diatas maka Nazir (1998:63) mengartikan metode penelitian kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif ini dapat dijalankan dengan melakukan survey di lokasi penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila keduanya ditempatkan secara berpasangan akan menimbulkan sejumlah tanda tanya atau kesulitan (Moleong, 2008: 93).

Dengan dasar pemahaman tersebut, maka fokus penelitian di dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak di Kabupaten Mojokerto, meliputi:

- 1) Peningkatan kemampuan finansial
- 2) Pengembangan Pemasaran dengan :
 - Meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar
- 3) Pengembangan Sumber daya manusia
- 4) Pemberian pengaturan dan pengendalian usaha, meliputi :

- a. Peningkatan kemudahan dalam layanan perijinan
 - b. Penguatan kelembagaan
- B. Keberdayaan UKM yang dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Meliputi:
1. Peningkatan pendapatan masyarakat pengrajin
 2. Pemasaran hasil usaha
 3. Jumlah Tenaga kerja yang terserap
- C. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak agar mampu menjadikan perak sebagai produk unggulan daerah meliputi :
- a. Faktor Pendorong
 1. Tenaga kerja yang cukup banyak
 2. Masih belum banyak pesaing yang memiliki usaha yang sama
 - b. Faktor Penghambat
 1. Mahalnya harga bahan baku
 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
 3. Terbatasnya modal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai keseluruhan ruang dimana fenomena ditangkap, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Adapun pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada aspek kemudahan dalam mendapatkan informasi dimana peneliti berdomisili di Kecamatan Gedeg tersebut.

Selain itu dipilihnya lokasi ini dikarenakan desa tersebut merupakan pusat dari produksi kerajinan perak yang saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan lisensi sebagai produk unggulan daerah.

Berdasarkan fakta yang ada dilapangan dapat diketahui bahwa industri kerajinan perak tersebut mampu menyokong perekonomian masyarakat. Namun walaupun demikian dalam perkembangannya pengrajin kerajinan perak itu sendiri masih mengalami kendala dalam hal tingkat permodalan, tehnik dan manajerial pemasaran serta pengembangan desain dan varian produk yang diinginkan oleh pembeli. Oleh karena itu bentuk-bentuk usaha yang mampu memberikan kontribusi perekonomian seperti halnya industri kerajinan perak perlu ada penanganan yang tepat oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga untuk mengetahui Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengelolaan industri kerajinan perak ini maka situs penelitian yang berkaitan adalah Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian berada di Kabupaten Mojokerto karena sesuai dengan keadaan geografis yang dipaparkan diatas, maka sektor industri kerajinan perak dalam hal ini perlu adanya penanganan yang tepat dari pemerintah daerah dalam hal permodalan, pemasaran sehingga kedepannya industri kerajinan perak ini mampu terus berproduksi dan menjadi salah satu produk unggulan daerah, disamping itu juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan (Arikunto, 2002:107) bahwa Sumber data dalam penelitian terbagi sebagai berikut:.

a. Sumber data

- a) Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana penentuan jumlah sampel bersifat tidak tentu. Artinya bila data yang diperoleh dari sampel yang ada sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel yang ada dinyatakan cukup.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kabid ILMATET(Industri logam, mesin dan aneka tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika), Staf bidang industri logam dan mesin, Perangkat Desa Batankrajan, Pengrajin kerajinan perak.

- b) Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis seperti Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2012, Renstra Disperindag 2011, bahan-bahan laporan seperti proposal pengembangan IKM dari KUB Majapahit Jewelry, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang tersedia dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian.
- c) Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan dengan Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Sebagai Produk Unggulan Daerah.

b. Jenis Data

a) Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dan sebenarnya, dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kaitanya dengan penelitian ini, pihak yang dimaksud antara lain:

- Pelaksana dan Sumber Daya yang dilibatkan dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Desa Batankrajan, antara lain:

1. Ibu Mustikawati Satatina (Kabid Industri logam, mesin dan aneka tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika).
2. Bapak Untung (Pelaksana dan staff bidang industri logam)
3. Ibu Sutrianik (Pengawas dari Desa).
4. Bapak Rohman (Pengurus KUB Majapahit Jewelry dan Pengrajin).
5. Bapak Purbo (Pendiri Sentra Industri Kerajinan Perak dan Pengrajin)
6. Bapak Sochwan (Pendiri dan pengrajin kerajinan perak).

b) Data Sekunder

Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik Dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data Melalui informan secara tertulis ataupun gambar-

gambar yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun yang dijadikan sumber data sekunder dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak ini adalah arsip-arsip seperti Proposal Pengembangan IKM oleh Majapahit Jewelry selaku wakil dari pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan, Dokumen atau surat keputusan, laporan-laporan yang berupa Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Desa Batankrajan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Hal ini juga dikarenakan bahwa data akan digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi: upaya yang dilakukan oleh pelaksana penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung di Desa Batankrajan berkaitan dengan Pemberdayaan kerajinan perak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk memperoleh informasi dan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan masalah penelitian maupun fokus penelitian.
2. Wawancara: percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas

pertanyaan itu. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 3 komponen

Lembaga yaitu:

- a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang ILMATET (Industri logam, mesin dan aneka tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika) yang terdiri dari Ibu Mustikawati Satatina selaku Penanggung Jawab Pemberdayaan pengrajin Kerajinan Perak. Bapak Untung selaku petugas lapangan dan staff bidang industri logam dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b) Pemerintahan Desa yang Terdiri atas Ibu Sutrianik (Kasi Pemerintahan) Selaku penanggung jawab pengrajin kerajinan perak di tingkat desa.
 - c) KUB Majapahit Jewelry yang terdiri atas Bapak Rohman (Pengurus KUB Majapahit Jewelry dan Pengrajin Kerajinan Perak), Bapak Purbo dan Pak Sochwan (Pendiri dan Pengrajin Kerajinan Perak).
3. Dokumentasi: suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini dokumentasi yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah Rencana Strategis dalam pemberdayaan pengrajin perak, proposal KUB Majapahit Jewelry terkait pengembangan IKM.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Instrument penelitian meliputi :

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri yang dijadikan instrument, karena peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpul data. Peneliti berperan menjadi objek sekaligus sebagai subjek data penelitian untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg.

2. Pedoman Wawancara (Interview Guide)

Didalamnya terdapat serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun yang memfokuskan pada permasalahan penelitian yang digunakan sebagai pedoman bagi peneliti yang melakukan wawancara dengan informan atau narasumber untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Fokus dari wawancara ini adalah kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang ILMATET dan pengrajin perak Desa Batankrajan.

3. Catatan lapangan

catatan yang dibuat oleh peneliti saat mengadakan pengamatan, wawancara maupun saat menyaksikan kejadian-kejadian tertentu. Catatan lapangan ini, telah peneliti kemas melalui buku catatan untuk menjadi bukti dan arsip dari pelaksanaan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

4. Perangkat Penunjang Lapangan

Perangkat penunjang lapangan merupakan alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera untuk merekam suara atau foto-foto aktivitas yang dilakukan oleh responden, hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis ketika pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak dapat ditangkap langsung oleh penulis.

5. Dokumen dan Arsip-Arsip

Instrument ini berupa data dari salinan arsip atau catatan resmi yang diperoleh penulis dari pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg yang kemudian nantinya digunakan penulis untuk menambah hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian.

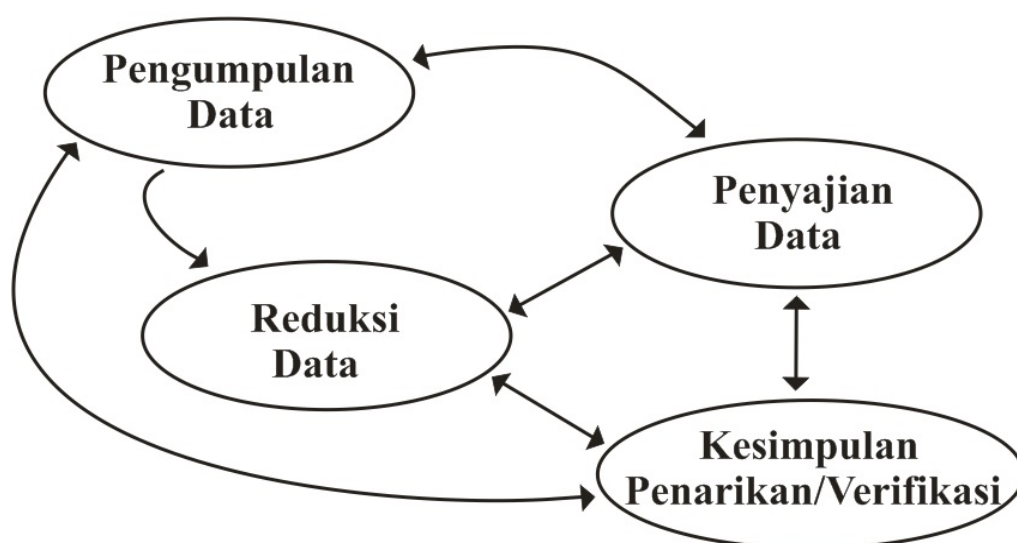
G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Konsep analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam (Basrowi dan Suwandi, 2008:193) prosesnya adalah:

1. Mencatat peristiwa yang ada di lapangan berupa catatan lapangan kemudian diberi kode sehingga sumber data dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan memilah-milah melakukan klasifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar, dan memberi indeks.
3. Berpikir untuk memperjelas kategori data sehingga data yang ada bermakna dengan mencari dan menemukan temuan-temuan umum.

Proses menganalisis dalam metode kualitatif dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis model interaktif Milles dan Hubberman (1992) dalam (Sugiyono, 2011:246). Model Interaktif dari Milles dan Huberman ini dipilih peneliti dengan pertimbangan secara penelitian kualitatif ini sesuai untuk mengetahui Faktor X guna mendapatkan suatu dampak berupa Y maka model ini sesuai dengan alur berfikir tersebut, artinya data yang nantinya di dapat dilapangan terkait Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengrajin kerajinan perak harus terlebih dahulu direduksi untuk diperoleh suatu gambaran secara pasti terkait dengan detail masalah dan fenomena yang ada di lapangan, setelah itu dipilah melalui penyajian data, serta yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan untuk kemudian mengetahui apakah benar yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan sudah mampu membuat pengrajin perak menjadi lebih berdaya dan menjadikan perak sebagai salah satu produk unggulan daerah dan identitas dari Kabupaten Mojokerto.

Analisis data kualitatif menurut Milles dan Hubberman (1992) dalam (Sugiyono, 2011:247-252) terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, model analisis interaktifnya bisa dilihat pada gambar 2.



Gambar 2: Model Analisis Data Kualitatif

Sumber : Miles dan Huberman diterjemahkan oleh (Sugiyono, 2011:247)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data: Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas, yang terdiri dari Wawancara dan dokumentasi dengan narasumber-narasumber yang relevan dengan fokus penelitian, seperti wawancara kepada perangkat desa, perwakilan Disperindag, perwakilan pengrajin perak di dalam pemberdayaan pengrajin perak.
2. Reduksi Data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. artinya disini peneliti melakukan penelahaan terhadap semua data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan dan yang telah dijelaskan diatas. Peneliti melakukan proses reduksi data terhadap data yang dikumpulkan dengan

cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu berusaha membuat rangkuman pada masing-masing fokus. Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji adalah data yang memang berhubungan dengan judul dari penelitian itu sendiri.

3. Penyajian Data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya disini bahwa data yang telah direduksi peneliti dari Fakta dan kejadian dilapangan dari pelaksanaan peran pemerintah dalam pemberdayaan pengrajin perak, kemudian peneliti melakukan display dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari situs Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dan lokasi penelitian di Desa Batankrajan kemudian disajikan sesuai dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diintrepetasikan oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus akan ditarik kesimpulan berdasarkan analisis pembahasan terkait dengan Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Dalam

Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

a. Sejarah Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kota dimana masih termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Timur. Dengan berdasar pada pasal dua pada Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 22/Tap/Kdh/1973 yang dikeluarkan pada 12 september 1973 dinyatakan bahwa hari jadi mengenai kabupaten mojokerto masih bersifat sementara, namun pada masa kepemimpinan Bupati Mojokerto bernama H. Mahmoed Zain, SH, Msi maka dimulailah berbagai upaya untuk mencari dan menelusuri hari jadi kabupaten mojokerto. Upaya pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pada tanggal 20 agustus 1991 dilaksanakan “Seminar Sehari” dengan tema “Kabupaten Mojokerto Menyongsong Hari Esok”.
- b. Pada tanggal 8 September 1992, dilaksanakan simposium menyongsong Tujuh Abad Mojopahit yang dihadiri oleh Sekjen Depdagri, Gubernur, Javanologi Surabaya, pakar-pakar sejarah baik dari Kabupaten Mojokerto sendiri maupun dari luar daerah.
- c. Pembentukan Tim Penelitian Sejarah dengan mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 438 Tahun 1992 tentang pembentukan Tim Penulisan Sejarah Mojokerto.

Dengan melihat rentetan peristiwa yang telah terjadi maka dapat ditetapkan 8 (delapan) alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai Hari Jadi Mojokerto yaitu:

- a. Pertemuan antara Perdana Menteri Mojopahit, Shi nan da cha ya dengan Shih pi yakni panglima tertinggi pasukan Tar-Tar, dapat dipandang sebagai wujud pengakuan diplomatik atas Negara berdaulat dalam rangka kerjasama internasional untuk menyerang Doho. Hal ini dapat mengacu pada tanggal 1 bulan ke-3 kalender Tarikh Cina atau bisa dikatakan tanggal 8 April 1293.
- b. Pada saat Raden Wijaya mulai mengatur strategi untuk melawan pasukan Tar-Tar, ia memperoleh ijin dari Kediri ke Mojopahit pada tanggal 2 bulan Ke-4 Tarikh Cina. Titik waktu ini merupakan titik awal kemenangan diplomatik dan militer dipihak Raden Wijaya, karena setelah itu kemudian secara bertahap Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Tar-Tar. Dalam Tarikh Masehi peristiwa tersebut adalah tanggal 9 mei 1293.
- c. Titik waktu tentara mojopahit memperoleh kemenangan total terhadap pasukan Tar-Tar. Dalam hal ini mengacu pada keputusan pimpinan pasukan Tar-Tar untuk meninggalkan Pat-Shich pada tanggal 24 Bulan ke-4 dalam kalender Tarikh Cina atau pada tanggal 31 Mei 1293. Namun titik waktu ini digunakan oleh kota Surabaya sebagai hari jadinya.
- d. Titik waktu penobatan Raden Wijaya sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Harsa Wijaya atau titik waktu penerbitan Prasasti Gunung Botak.
- e. Dari Khasanah Kidung, juga menunjukan terjadinya peristiwa penting dalam sejarah Mojopahit.

- f. Dari khasanah prasasti juga ditemukan titik waktu peristiwa yang erat kaitannya dengan sejarah Mojopahit. Kidung Harsa Wijaya menyebutkan bahwa Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja terjadi pada tanggal 12 November 1293. Titik waktu ini kemudian dikenal sebagai Hari Mojopahit, Prasasti Gunung Botak yang diterbitkan pada tanggal 11 september 1294 memberitakan secara panjang lebar riwayat Rajakuta Mojopahit.
- g. Perjanjian Ganti yang ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 1755.
- h. Saat ditanda tangani penyerahan kabupaten Japan pada tanggal 1 Agustus 1812 oleh kesultanan Jogjakarta kepada Pemerintah Inggris di Jawa.

Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan yang sangat panjang pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto, mengenai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto maka disepakatilah Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang tepat pada tanggal 9 Mei 1293 Masehi, yang semua itu terdapat pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 09 Tahun 1993 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 1993. Selanjutnya Bupati selaku Kepala Daerah yang saat itu dijabat oleh H. Mahmoed Zain, SH, MSI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 230 Tahun 1993 yang disepakatilah tanggal 9 Mei 1993 sebagai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan dengan tidak berlakunya Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 22/TAP/Kdh/1973 Tentang Penetapan Sementara Hari Jadi Kabupaten Mojokerto, maka akhirnya menjadi tanggal 09 Mei 1293 Masehi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto.

b. Keadaan Geografis dan Topografis Kabupaten Mojokerto

Wilayah Kabupaten Mojokerto adalah suatu wilayah dimana masih dalam Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'30" Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Jika ditinjau wilayah Kabupaten Mojokerto seluas 969.360 Km² dipergunakan secara bermacam-macam meliputi :

✓ Pemukiman	: 132,440 Km ²
✓ Pertanian	: 371,010 Km ²
✓ Hutan	: 289,480 Km ²
✓ Perkebunan	: 170, 000 Km ²
✓ Rawa/waduk	: 0,490 Km ²
✓ Lahan Kritis	: 0,200 Km ²
✓ Padang Rumput	: 1,590 Km ²
✓ Semak/Alang-alang	: 0,720 Km ²

Sumber: RKPD Kabupaten Mojokerto 2013

Secara Geografis juga Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Sumber: RKPD Kabupaten Mojokerto 2013

Disamping itu selain berbatasan dengan wilayah kabupaten yang ada diatas, Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di Tengah-Tengah Wilayah Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya mengenai Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan bagian pegunungan yang subur, meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur dan hanya dimanfaatkan sebagai pertambangan.

Tabel 2

Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah *) (Km ²)
1	Jatirejo	140	107,62
2	Gondang	240	98,62
3	Pacet	570	107,98
4	Trawas	800	58,00
5	Ngoro	25	70,50
6	Pungging	30	45,00
7	Kutorejo	500	43,50
8	Mojosari	36	28,85
9	Bangsar	30	25,84
10	Mojoanyar	23	23,37
11	Dlanggu	17	35,82
12	Puri	70	34,65
13	Trowulan	40	45,93
14	Sooko	64	19,30
15	Gedeg	26	26,18
16	Kemlagi	22	42,35
17	Jetis	35	53,05
18	Dawarblandong	75	102,80
	Kab. Mojokerto	30	969,36
Keterangan : (*) Luas Daerah termasuk hutan Negara			

(Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2011)

Sekitar 30 % dari wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki kemiringan tanah lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya ketinggian di wilayah Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah ketinggian lebih dari 700 meter diatas permukaan laut. Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan, 229 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan adalah 969,360 Km², untuk perinciannya tersebut dapat dilihat dari tabel yang ada diatas.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena disamping menjadi obyek pembangunan penduduk sekaligus menjadi pelaku pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah penduduk yang ada disuatu daerah. Beberapa metode dipakai dalam menghitung jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto, diantaranya adalah melalui Sensus Penduduk, Survei Kependudukan, Registrasi Penduduk dan Penghitungan Kepadatan Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 sebesar 1.112.821 jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 3 tahun terakhir mencapai 4,02 %. Jumlah penduduk dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Tahun 2009-2011

	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Jumlah Penduduk	1.070.579	1.088.632	1.112.821
Laki	538.115	547.322	559.793
Perempuan	532.464	541.310	553.028

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto
2011

Berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dalam tahun 2011 jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Mojokerto sebesar 559.793 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 553.028 jiwa. Berikut adalah data jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut jenis kelamin untuk tiap kecamatan.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	JATIREJO	21.741	21.266	43.007
2.	GONDANG	21.852	21.642	43.494
3.	PACET	29.092	29.042	58.134
4.	TRAWAS	15.172	15.214	30.386
5.	NGORO	39.576	39.641	79.217
6.	PUNGGING	38.062	37.676	75.738
7.	KUTOREJO	31.971	31.251	63.222
8.	MOJOSARI	39.768	38.753	78.521
9.	DLANGGU	28.000	27.800	55.800
10.	BANGSAL	25.963	25.360	51.323
11.	PURI	37.676	37.156	74.832
12.	TROWULAN	38.043	37.249	75.292
13.	SOOKO	38.148	37.336	75.484
14.	GEDEG	30.938	30.499	61.437
15.	KEMLAGI	29.992	29.970	59.962
16.	JETIS	42.555	41.934	84.489
17.	DAWARBLANDONG	25.972	26.614	52.586
18.	MOJOANYAR	25.272	24.625	49.897
JUMLAH		559.793	553.028	1.112.821

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2011

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

Lembaga yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jln. Mojopahit No. 582 Kabupaten Mojokerto. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terlihat cukup sederhana layaknya kantor pemerintahan pada umumnya. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terletak di sebelah selatan pusat Kota Mojokerto, sehingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Mojokerto seperti yang tampak pada gambar 3:



Gambar 3: Profil Dinas Perindustrian dan perdagangan

Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dipilih sebagai situs penelitian karena dinas inilah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan pengrajin kerajinan perak dan industri kecil. Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto melakukan pemberdayaan kepada usaha-usaha kecil yang kegiatan produksinya yaitu mengolah bahan baku/bahan dasar menjadi suatu produk baru. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terhadap industri-industri kecil baik industri rumah tangga, industri kecil menengah dan industri besar adalah bertujuan agar industri tersebut dapat mengembangkan dan memperanekaragaman produknya.

Pemberdayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto lebih kepada bantuan peralatan dan teknologi karena usaha industri adalah suatu usaha yang kegiatan produksinya dengan melakukan pengolahan. Maka dari itu, potensi yang dimiliki industri kecil dalam mengembangkan usahanya sangat luas karena dengan pemberdayaan dan pembinaan yang baik maka suatu industri kecil dapat mengembangkan usahanya dengan menginovasi produknya sehingga menciptakan suatu produk baru di pasar sehingga peluang untuk memperluas pemasaran semakin terbuka.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 dijelaskan tentang pembagian tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Dalam Bab I dijelaskan bahwa

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
- 2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 4) Bupati adalah Bupati Mojokerto
- 5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
- 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
- 7) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

8) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Dengan susunan organisasi terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang yang meliputi: Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, mempunyai tugas meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pengintegrasian kegiatan administrasi tingkat internal bagian sekretariat dan bidang bina perindustrian dan perdagangan
- b. Memberikan bimbingan, petunjuk, pengawasan serta penilaian pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas dibidang organisasi tata laksana dan peningkatan aparatur pemerintah di lingkungan dinas.
- d. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka, tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika.

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif. Bidang Bina industri Logam, Mesin, Aneka Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika membawahkan dan mengkoordinasikan :

- a. Kegiatan operasional bidang industri logam, mesin, aneka tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika (ILMATET).
- b. Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi, dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun.
- c. Penetapan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi industri.
- d. Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Seksi industri Logam dan Mesin mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman teknis bahan pembinaan dan kerjasama di bidang industri logam dan mesin.
- b. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi Berita Acara Penerimaan (BAP) dan Rekomendasi terhadap setiap penerbitan ijin industri yang diterbitkan di kabupaten.
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberian fasilitas usaha industri logam dan mesin.
- d. Menyiapkan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seksi bimbingan logam dan mesin.

a) Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Mojokerto

Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan

memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 yakni :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri dan perdagangan yang maju, tangguh, berdaya saing tinggi di pasar lokal atau internasional”

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

1) Industri dan perdagangan yang maju

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah industri yang sudah berkembang dan tangguh karena didukung oleh sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kualified serta didukung oleh tumbuh dan berkembangnya kawasan industri yang menghasilkan produk-produk yang berorientasi pasar lokal dan ekspor, berbasis teknologi tinggi serta ditopang oleh industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat berbasis sumber daya daerah yang potensial dan teknologi tepat guna. Terwujudnya kabupaten mojokerto sebagai daerah perdagangan yang maju dengan sarana dan prasarana perniagaan seperti pasar tradisional yang bersih sehat, aman dan nyaman serta merata disetiap wilayah kecamatan; pusat grosir dan produk-produk unggulan yang representatif dan mudah dijangkau pedagang eceran serta toko dan pasar modern (waralaba) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Tangguh, Berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.

Terwujudnya kabupaten mojokerto sebagai daerah industri yang tangguh karena didukung oleh sumber daya alam yang memadai dan

sumber daya manusia yang berkualitas sehingga produktifitas akan selalu meningkat pada situasi dan kondisi perekonomian yang bagaimanapun juga. Dukungan dari IKM yang kuat di daerah-daerah sebagai tulang punggung perekonomian daerah juga sebagai pendukung pengawasan untuk menyerap tenaga kerja yang belum tertampung di sektor industri formal. Terwujudnya Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang berdaya saing tinggi yang menghasilkan produk yang berkualitas, harga yang kompetitif sesuai dengan tuntutan pasar lokal maupun pasar global yang dihasilkan melalui proses industri yang efektif, efisien dan produktifitas yang tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu berperan dan yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang baik. visi yang dimaksud adalah sebagai wilayah industri yang sudah mulai berkembang yang harus bertumpu pada potensi dalam sumber daya daerah maka diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh, kuat, dan maju serta berdaya saing tinggi, juga bertumpu pada sumber daya industri yang berkualitas serta makin mampu memanfaatkan teknologi yang tinggi. Dan sebagai wilayah niaga yang tangguh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu tiang penunpu Pemerintah Kabupaten Mojokerto, harus mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang dan kondisi global sehingga mampu juga bersaing baik di Pasar Dalam Negeri maupun Pasar Luar Negeri. Daerah industri dan perdagangan yang maju adalah Kabupaten Mojokerto memiliki

Lembaga dan pranata ekonomi yang telah tersusun, tertata dan berfungsi secara baik, sektor industri dan perdagangan yang terus berkembang, produk domestik regional bruto (PDRB) yang tinggi dan semakin meningkat (Sumber: Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto 2011-2015)

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing industri dan pasar lokal melalui bimbingan penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses serta hasil produksi industri.
- 2) Mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional.
- 3) Meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar.
- 4) Meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan.

b) Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna. Berdasarkan arti dan makna

penetapan tujuan organisasi tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi meningkatkan daya saing industri dan pasar lokal melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses serta hasil produksi industri maka ditetapkan tujuan yaitu mendorong perekonomian kegiatan usaha Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menerapkan TTG (teknologi tepat guna) serta meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM pengusaha IKM.
2. Untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional maka ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kegiatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen dan meningkatkan kegiatan promosi hasil-hasil produksi industri daerah Kabupaten Mojokerto di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
3. Untuk meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar maka ditetapkan tujuan yaitu meningkatkan kenyamanan bertransaksi, mengembangkan kerjasama usaha yang sinergis antara usaha mikro, usaha kecil menengah dengan pembinaan usaha yang saling menguntungkan serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan bertanggung jawab.
4. Untuk meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan maka ditetapkan tujuan yaitu

meningkatkan kedisiplinan, pengetahuan dan wawasan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, tertib administrasi perkantoran yang didukung dengan sarana yang layak serta meningkatkan pengaturan laporan rutin setiap tahun.

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 “meningkatkan daya saing industry besar dan pasar lokal melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta pengawasan terhadap proses dan hasil produksi” maka ditetapkan sasaran: terwujudnya IKM, sentra-sentra industry kecil dan kelompok industri kecil nonformal yang beralih teknologi ke TTG sehingga terwujud hasil industri yang mempunyai standar produk (SNI)
2. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 2 “mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan sehat, terkendali dan efektif serta efisien melalui pembinaan, penataan, pengawasan dan perlindungan konsumen serta mempromosikan baik lokal, regional, nasional dan internasional” maka ditetapkan sasaran: terwujudnya kegiatan pengawasan dan penindakan distribusi barang dan jasa yang wajib SNI serta meningkatkan perluasan pangsa pasar.

3. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 3 “meningkatkan pasar sebagai tempat transaksi yang representatif dengan meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai penyedia barang dan jasa di pasar” maka ditetapkan sasaran: terwujudnya sarana penunjang kenyamanan bertansaksi di pasar yang akan mewujudkan peningkatan PAD tiap tahun.
4. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 “meningkatkan kualitas aparatur sebagai daya dukung utama pengembangan industri dan perdagangan” maka ditetapkan sasaran: pertama, terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Kedua, terwujudnya peningkatan kinerja melalui tersedianya sarana dan prasarana.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Lokasi

Desa Batankrajan merupakan salah satu daerah bagian dari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi usaha ini adalah :

1) Lokasi Yang Strategis

Untuk lokasi dari Desa Batankrajan itu sendiri yang berada di Kabupaten Mojokerto sangat menunjang sekali digunakan untuk kegiatan usaha. Selain karena letaknya berada ditengah antara ibukota provinsi dengan daerah lain yang merupakan sebagai penghubung daerah lain hal tersebut juga ditunjang dari segi pemasaran yang lebih mudah karena dapat menjangkau semua daerah.

2) Tenaga Kerja yang memadai

secara kualitas dan kuantitas dapat terpenuhi karena daerah sekitar lokasi usaha ini tersedia tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Batankrajan Kecamatan Gedeg sebanyak 2968

Jiwa yang terdiri dari 901 KK (Kepala Keluarga), yang meliputi :

Laki-Laki :1462 Jiwa

Perempuan : 1506 Jiwa

Sumber : Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg 2013

c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi di suatu desa dengan struktur ekonomi yang diharapkan, maka pembangunan perlu direncanakan dengan baik dan hasil pembangunan yang telah tercapai perlu adanya evaluasi yang baik dari pemerintah yang ada.

Kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat berkaitan erat dengan sumber pendapatan masyarakat yang ada di desa tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan maju atau terbelakang terlihat dari tingkat perekonomian dan kesejahteraan dari masyarakatnya. Dari segi perekonomian, penduduk Desa Batankrajan ini terbagi atas berbagai mata pencaharian antara lain terdapat dalam tabel 5

Tabel 5

Keadaan Perekonomian/Mata Pencaharian Tahun 2013

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	128
2.	Pedagang	175
3.	Buruh	339
4.	PNS	29
5.	TNI	6

No	Mata Pencaharian	Jumlah
6.	Polri	2
7.	Swasta	885
8.	Montir	2
9.	Pengrajin / UKM	14
10.	Lain – Lain	188

Sumber : Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar warga desa Batankrajan bekerja Swasta. Sedangkan dibidang usaha kecil terutama kerajinan perak dijadikan sebagai pekerjaan sampingan selain di sektor swasta.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh warga desa dikarenakan tingginya potensi yang dapat dihasilkan yang terlihat dari banyaknya jumlah buruh atau yang bekerja serabutan sehingga muncullah ide untuk membuat kerajinan perak yang meskipun hal tersebut merupakan pekerjaan sampingan namun dengan adanya tersebut keadaan perekonomian Desa Batankrajan sedikit berubah. Hal tersebut tampak dari semakin meningkatnya jumlah industri baik yang kecil maupun industri rumah tangga.

Tabel 6

Status Kepemilikan Industri

Status Kepemilikan	Industri	Jumlah
Pemilik	Industri Kecil	41
	Industri Rumah Tangga	42
Buruh	Industri Kecil	26
	Industri Rumah Tangga	40

Sumber : Desa Batan krajan Kecamatan Gedeg 2013

d. Awal Mula Desa Batankrajan Sebagai Sentra Kerajinan Perak

Desa Batankrajan terletak di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan telah lama dikenal sebagai daerah pusat kerajinan perhiasan perak yang ada di

mojokerto. Kerajinan perak di Desa Batankrajan mulai Dirintis sejak tahun 1970-an oleh Purbo yang dahulunya bekerja di Bali dan menekuni kerajinan perak disana. Ketika pulang ke Desa Batankrajan Purbo merasa prihatin karena banyak anak-anak muda dengan usia produktif tidak bekerja dan waktu itu pengangguran di Desa Batankrajan hampir mencapai 80%. Setelah itu purbo mencoba untuk membuka sendiri usaha kerajinan perak di Desa Batankrajan dengan berbekal pengalamannya ketika di Bali. Namun tidak disangka ternyata usahanya sukses dan maju saat itu sehingga purbo mampu menampung pegawai yang rata-rata masyarakat desa Batankrajan sebanyak 32 orang.

Dengan kesuksesan yang didapat purbo, ia kemudian berpikir untuk membuat desanya sebagai sentra kerajinan perak dengan mendorong pegawai-pegawainya yang telah mahir dan terampil dalam membuat kerajinan perak untuk membuat sendiri usaha kerajinan perak. Dengan dorongan purbo dan bimbingannya dalam mengolah perak tersebut akhirnya banyak bermunculan pengrajin perak baru di desa batankrajan hingga mencapai sekitar 50-an saat itu. Kini, sektor usaha kerajinan perak telah mengalami perkembangan kendati sempat surut akibat beberapa masalah global dan yang tersisa tinggal 22 unit usaha, namun hal itu tetap menempatkannya sebagai lapangan pekerjaan kedua di Desa Batankrajan setelah sektor pertanian.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Mojokerto

Peran pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah khususnya para pengrajin perak adalah sifatnya mutlak.

Pemerintah sebagai pelindung dari usaha kecil menengah harus mampu menyediakan modal baik material, intelektual dan institusional, mengingat usaha kecil menengah ini merupakan salah satu tulang punggung dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya pemberdayaan berkelanjutan untuk jangka panjang sehingga nantinya mampu bersaing di pasar global dan mengangkat perekonomian Indonesia secara umum dan Kabupaten Mojokerto secara khusus. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memiliki sejumlah tugas masing-masing dalam menjalankan fungsinya yang nantinya mampu melaksanakan percepatan pemberdayaan UKM. Dari sebagian besar tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tersebut adalah sebagai fasilitator dan membantu pembinaan para pengrajin kerajinan perak untuk meningkatkan produknya hingga menjadi produk unggulan daerah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Untung selaku staff bidang industri logam dan mesin sebagai berikut :

“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini sebagai instansi yang menaungi pengrajin adalah bisa dikatakan hanya sebagai fasilitator dan pendampingan yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap proses perkembangan usaha kecil. Untuk mewujudkan semua itu maka perlu diadakan adanya pembinaan dan pelatihan melalui workshop yang biasanya dilakukan setiap 2 bulan sekali tergantung anggaran yang ada”. (wawancara hari Kamis 13 Juni 2013, Pukul 14.00 WIB di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Bidang Logam).

Dengan demikian peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan proses pemberdayaan usaha pengrajin kerajinan perak meliputi:

a. Peningkatan Kemampuan Finansial

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan finansial dari UKM pengrajin perak sangatlah penting dalam kehidupan berusaha, dilihat dari sudut pandang manajemen modern dapat diartikan bahwa keuangan atau finansial merupakan salah satu segi fungsional manajemen disamping pemasaran dan produksi. Sehingga dalam hal ini pemerintah selaku fasilitator yang diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mendukung peningkatan produksi dari kerajinan perak adalah dengan meningkatkan kemampuan finansial dari UKM itu sendiri dengan cara memberikan bantuan kredit lunak kepada pengrajin kerajinan perak mulai dari tahun 2004, dan program tersebut sampai saat ini masih dijalankan seperti yang diungkapkan oleh ibu Mustikawati satatina selaku Kabid Ilmatet Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa:

“agar pengrajin perak mampu menjalankan usahanya tanpa terganggu oleh masalah finansial khususnya modal maka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan informasi terhadap lembaga-lembaga keuangan. Melalui pengajuan proposal yang disetujui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto para pengrajin dapat meminjam modal untuk meningkatkan finansial dari internal UKM itu sendiri. Proposal yang telah disetujui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto kemudian dapat diajukan ke lembaga keuangan yang telah ditunjuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk memperoleh kredit lunak seperti BRI ataupun BNI. Kredit lunak tersebut diberikan kepada pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga maksimal 30 juta untuk jangka waktu angsuran 2-3 tahun dan jika menginginkan diatas 30 juta maka peminjam diperkenankan membawa jaminan. Untuk persyaratannya cukup mudah, pengrajin hanya membawa KTP/KK (Kartu Keluarga), surat keterangan desa dan proposal yang disetujui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto” (wawancara hari Kamis 13 Juni 2013, pukul 14.30 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).

Peran yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kekuatan finansial dari UKM pengrajin perak di

Kabupaten Mojokerto diwujudkan melalui bantuan kredit lunak yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kemudian disalurkan lewat bank BRI dan BNI. Kredit tersebut disalurkan lewat bank BRI dan BNI bukan tanpa alasan, karena cabang-cabang bank BRI dan BNI tersebar diseluruh pelosok daerah tidak terkecuali di wilayah Gedeg sehingga sangat mudah dijangkau oleh para pengusaha kecil seperti pengrajin perak. Bantuan permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut diharapkan mampu membantu meningkatkan kemampuan finansial dari pengrajin perak itu sendiri sehingga proses produksi perak dapat berjalan terus dan tidak terkendala masalah finansial. Adapun melalui KUR tersebut pengrajin dapat memperoleh pinjaman yang besar dengan bunga yang kecil dan dengan waktu pengembalian yang lama. Melalui hal tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi kepada pengrajin kerajinan perak agar lebih meningkatkan proses produksinya dengan mengembangkan perak dengan desain-desain yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat pasaran lokal maupun internasional yang nantinya mampu menjadikan perak sebagai produk unggulan daerah.

Namun kenyataannya di lapangan, peran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kemampuan finansial pengrajin perak masih belum mendapatkan respon yang baik dari sebagian besar pengusaha kerajinan perak Desa Batankrajan, hal itu dikarenakan banyak para pengrajin perak Batankrajan yang merasa bahwa jika meminjam di bank bunganya terlalu besar dan takut tidak bisa melunasi tepat waktu. Hal tersebut didasarkan pada biaya produksi dan bahan baku yang tiap saat bisa naik sehingga jika meminjam di Bank dikhawatirkan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan karena keuntungan yang didapat dibuat untuk membayar pinjaman yang ada di Bank. Walaupun sebenarnya jika meminjam di

bank mereka tidak perlu memberikan jaminan yang besar, cukup hanya membawa KK (Kartu Keluarga)/KTP dan proposal yang telah disetujui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengenai usaha yang dimiliki. Namun walaupun demikian mereka menganggap bahwa belum membutuhkan pinjaman dari Bank, cukup pinjaman dari desa ataupun pinjaman kelompok usaha seperti yang diungkapkan oleh bapak Purbo selaku Pendiri Sentra industri kerajinan perak desa batankrajan dan Pendiri Kelompok Usaha Bersama Majapahit Jewelry, yang mengatakan bahwa :

“awalnya saya mampu mendirikan ukm kerajinan perak ini berasal dari modal sendiri, hasil dari bekerja di bali. Setelah itu saya berjuang untuk meningkatkan kekuatan finansial produksi saya dengan meminjam di dealer, waktu itu juga pengrajin yang ada jg kebanyakan meminjam di dealer ataupun koperasi. Walaupun sebenarnya saat itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga memberikan bantuan permodalan melalui bank BRI namun karena takut dengan jaminan dan bunganya yang besar serta tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan akhirnya mereka membiarkan saja.” (wawancara hari senin 17 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB di rumah bapak purbo)

Dalam hal ini Bapak Purbo sebagai pengrajin perak dan pendiri kelompok sentra industri kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto menganggap bahwa jika dibandingkan dengan saat awal kemunculan kerajinan perak di Kabupaten Mojokerto, saat itu pengrajin masih sangat susah sekali untuk mengembangkan usahanya, selain harga bahan baku yang tidak stabil disamping itu juga kekuatan finansial dari pengrajin itu sendiri yang masih lemah, hal itu dikarenakan kurang perhatiannya pemerintah daerah saat itu, namun untuk sekarang pengrajin kerajinan perak sudah mendapat kemudahan dalam mendapatkan bantuan permodalan sehingga kekuatan finansial untuk meningkatkan produksi mereka sudah sedikit kuat. Hal tersebut diungkapkan sebagai peran dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kekuatan finansial dari

UKM yang dilakukan dari berbagai tingkat pemerintahan baik dari desa, kecamatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan menyediakan beberapa lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman atau kredit lunak bagi pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan. Namun walaupun demikian tampaknya belum semua pengrajin kerajinan perak memanfaatkan hal tersebut karena berbagai alasan yang diantaranya bunga dan jaminan dianggap terlalu besar selain itu takut apabila tidak bisa mengembalikan tepat waktu dikarenakan harga bahan baku dan biaya produksi yang tidak stabil sehingga akhirnya mereka hanya membiarkan saja.

Disamping penjelasan dari Bapak purbo, masih ada penjelasan lain yang diutarakan oleh Bapak Rohman selaku pengurus KUB (Kelompok Usaha Bersama) Majapahit Jewelry yakni :

“Mengenai proses berdirinya usaha saya ini, awalnya saya memakai modal sendiri, setelah mulai agak kuat usaha saya kemudian pemerintah melalui Disperindag mulai memperhatikan usaha saya ini. Saat itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan sosialisasi bahwa untuk menguatkan finansial dari pengrajin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan melalui Kredit atau pinjaman di BRI dengan syarat yang cukup mudah yakni hanya membawa KTP/KK dan proposal yang disetujui dari pihak dinas. Namun saat itu saya masih takut untuk meminjam banyak karena takut tidak bisa mengembalikan.” (wawancara hari senin 17 Juni 2013 Pukul 13.00 WIB di rumah Bapak Rohman).

Dari hasil wawancara terhadap Bapak Rohman dapat dikatakan bahwa pengrajin kerajinan perak di desa Batankrajan ini pada umumnya masih enggan memanfaatkan pinjaman atau kredit yang diberikan pemerintah daerah padahal pemerintah daerah berniat untuk menguatkan sisi finansial dari UKM kerajinan perak namun karena dilatarbelakangi beberapa alasan seperti tidak bisa mengembalikan, takut persyaratan administratifnya yang sulit, dll itulah yang membuat pengrajin enggan melakukan pinjaman di Bank sedangkan bagi

pengrajin yang sudah pernah meminjam di bank yang telah direkomendasikan oleh pemerintah lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dapat merasakan kemudahan dalam menguatkan finansial usaha mereka melalui tambahan modal. Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terhambatnya perkembangan usaha kecil akibat kekurangan modal tidak terbukti melalui fakta yang ada ini karena pada kenyataannya pemerintah telah memberikan fasilitas yang mengakomodasi usaha kecil melalui pemberian pinjaman modal melalui bank untuk meningkatkan kekuatan finansial dari pengrajin itu sendiri, namun karena ketakutan dari pengrajin itu sendiri yang membuat mereka enggan untuk meminjam dan memanfaatkan sarana yang telah disediakan.

b. Pengembangan Pemasaran

- Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar

Akses terhadap pasar merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh didalam usaha kecil karena kelangsungan hidup usaha kecil ditentukan dari pasar. Semakin besar wilayah pemasaran dan banyaknya permintaan pasar maka semakin besar pula peluang usaha kecil bisa bertahan. Jika melihat perkembangan usaha kecil kerajinan perak pada umumnya pemasaran dari kerajinan perak ini masih terbatas pada pasar domestik sehingga omset yang dihasilkan juga masih kecil dan terbatas, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Untung selaku staff bidang industri logam dan mesin.

“Untuk menangani permasalahan semacam ini kami telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar. Melalui upaya peningkatan akses pemasaran ini kami mencoba untuk memperluas wilayah pemasaran dari yang semula hanya di pasarkan di galeri-galeri di bali dan solo kemudian bisa ditambah pemasarannya di wilayah seluruh Indonesia maupun pasar internasional.

Untuk dapat mencapai semua itu kami selaku fasilitator memberikan kesempatan bagi pengrajin perak untuk mengikuti pameran-pameran di berbagai daerah di Indonesia agar masyarakat lebih luas mengetahui produk perak yang dihasilkan Kabupaten Mojokerto ini sehingga kedepannya mampu menjadi produk unggulan daerah. Disamping memberikan kesempatan mengikuti pameran untuk memperkenalkan produk kerajinan perak terhadap masyarakat Indonesia, kami juga memberikan pelatihan pengembangan website agar produk tersebut juga dikenal oleh pasar internasional dengan bekerjasama dengan beberapa pihak universitas salah satunya UPN (Universitas Pembangunan Nasional) guna memberikan pelatihan cara mengolah website tersebut agar menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi pengrajin kerajinan perak di Batankrajan”(wawancara hari Kamis 13 Juni 2013 pukul 14.00 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).

Bapak Untung menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan akses usaha kecil kerajinan perak terhadap pasar adalah membuka dan memperluas akses pemasaran dengan mengikutsertakan pengrajin perak dalam pameran produk unggulan daerah yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dengan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto di daerah lain. Pameran ini bertujuan untuk menarik minat konsumen tidak hanya di wilayah Mojokerto, Bali dan Solo namun bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga mampu meningkatkan omset pengrajin perak. Peran pemerintah khususnya dinas yang bersangkutan disamping memperkenalkan produk kepada masyarakat luas di Indonesia yakni memberikan pelatihan pengembangan website melalui kerjasama dengan pihak universitas sehingga pengrajin perak mampu mengolah website dalam menerima pesanan produk perak baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai strategi pemasaran mereka.

Sebelum adanya perhatian dari pemerintah, pengrajin perak telah memiliki wilayah pemasaran seperti Solo, Bali, Mojokerto dan Surabaya namun hal

tersebut masih bergantung dari gallery yang menjadi tempat pemasaran mereka. Jika galeri yang menjadi tempat penitipan produk mereka sepi pengunjung maka dapat dipastikan omset yang mereka dapatkan akan lebih menurun. Namun untuk sekarang setelah dilakukan pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, daerah pemasaran mereka menjadi lebih luas dan tidak tergantung pada galeri-galeri yang mereka titipi saja namun juga pasar domestik dan pasar internasional yang mulai meminati kualitas produk kerajinan perak yang dihasilkan dari Batankrajan ini. Untuk pasar domestik pengrajin kerajinan perak ini memasarkan bukan hanya di wilayah Bali, Solo, dan seluruh area Jawa Timur namun sudah mulai memasuki area seluruh Indonesia. Untuk pasar internasional produk kerajinan perak ini sudah dipasarkan ke Negara Jerman, Italia dan Prancis sebagai peminat utama. Produk yang diminati itu antara lain cincin, gelang, kalung dan anting dengan berbagai model seperti apa yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Purbo selaku pendiri dan pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan, beliau mengatakan:

“jika ditanya mengenai perhatian pemerintah terhadap pengrajin perak jawabannya ada, tapi disini peran yang diberikan pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan akses usaha kecil terhadap pasar masih hanya mampu dilingkup domestik saja belum ada koneksi terhadap orang asing sehingga saat itu kami berinisiatif dengan di bantu mahasiswa kami mencoba memasarkan dan promosi lewat website dengan tujuan bisa menembus pasar eropa. Awalnya orang eropa meragukan kualitas produk kami, setelah kami yakinkan dengan dibantu teman kami yang berasal dari Jerman akhirnya mereka mulai mengakui bahwa produk kami berkualitas. Untuk pemesanannya bisa dilakukan lewat email, dengan DP senilai 30-40 % dan desainnya sesuai dengan permintaan. Untuk pengirimannya akan di email satu hari sebelum pengiriman. Produk yang biasanya di minati orang eropa biasanya adalah cincin, kalung, gelang dan anting dengan tampilan agak kuno” (wawancara hari Senin 17 Juni Pukul 10.00 WIB di rumah bapak Purbo).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan pihak Universitas untuk memaksimalkan pemberdayaan pengrajin kerajinan perak melalui berbagai macam pembinaan seperti strategi pemasaran dan cara memanajemennya. Peningkatan akses pemasaran dengan bekerjasama dengan pihak universitas sangat berguna dalam memfasilitasi pemasaran produk-produk unggulan daerah melalui pemberian motivasi pengrajin kerajinan perak yang belum berdaya untuk mau mengikuti pembinaan pemasaran melalui website disamping mengikuti pameran-pameran di berbagai daerah agar produk olahan perak lebih di kenal masyarakat luas.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kemajuan dari sebuah usaha baik yang sudah maju maupun yang masih kecil tidak akan terlepas dari faktor sumber daya manusia. Melalui sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu membuat usaha menjadi lebih maju namun jika kualitas sumber daya manusia tersebut masih rendah maka usaha tersebut condong kaku dan tidak ada perluasan pasar. Hal itulah yang terjadi seperti pada industri kecil dan industri rumah tangga di pedesaan yang rata-rata kualitas sumber daya manusianya masih minim akibat pendidikan yang ditempuh juga minim.

Sesuai yang ada pada tabel yang sebelumnya, dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan Desa Batankrajan sebagian besar hanya lulusan SMP/ sederajat. Seperti yang terjadi pada pengrajin kerajinan perak yang rata-rata pendidikannya hanya lulusan SMP, hal itu diungkapkan oleh Bapak Purbo sebagai berikut :

“Memang pada awalnya saya berpandangan bahwa menjalankan usaha ini tidak perlu pendidikan yang tinggi karena yang dibutuhkan hanya ketrampilan dan tenaga saja. Namun seiring berkembangnya jaman dan teknologi yang maju kami seakan tertinggal karena tidak mampu mengoperasikan peralatan yang berteknologi tinggi tersebut akibatnya proses produksi kami terhambat. Kebanyakan masyarakat disini yang menjadi pengrajin perak pendidikannya tidak terlalu tinggi, seperti yang seumuran dengan saya hanya lulusan SD dan SMP saja. Sedangkan jika anak-anak muda yang seumuran dengan anak saya kebanyakan lulusan SMA/SMK dan jika melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itupun bisa dihitung dengan jari” (wawancara hari senin 17 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB di rumah Bapak Purbo).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pendidikan yang menjadi pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan masih tergolong sangat rendah. kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan SLTP sederajat seperti yang didapat oleh bapak purbo, namun walaupun demikian beliau mendapatkan pengalaman membuat kerajinan perak dari hasil merantau dan belajar pada pengrajin perak di Bali. Setelah mendapatkan ilmu pembuatan kerajinan perak kemudian pak purbo menularkan dan mengajari teknik pembuatan perak tersebut kepada teman-teman seangkatan beliau yang hanya lulusan SMP ketika kembali ke desanya. Sehingga dapat dijelaskan bahwa ketrampilan yang dimiliki para pengrajin kerajinan perak tidak terlepas dari usaha pak purbo, namun itu hanya sebatas proses produksi kerajinan perak, sedangkan untuk urusan manajemen, pembukuan dan penggunaan teknologi electroplating yang berguna untuk melapisi perak namun sebenarnya lapisan yang digunakan bukan perak, yang juga biasanya sering disebut suasa, belum dimiliki oleh pengrajin perak.

Melihat kondisi yang demikian Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berusaha melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan. Kegiatan yang dilakukan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto itu adalah memberikan pembinaan dan pelatihan secara langsung kepada pengrajin kerajinan perak secara kontinyu melalui TPL (tenaga pelatihan) dan jika mereka membutuhkan informasi atau keterangan-keterangan dapat langsung menghubungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. seperti yang diungkapkan oleh ibu Mustikawati satatina selaku Kabid Ilmatet Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa:

“pada dasarnya sesuai dengan permintaan pengrajin, kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memberikan pembinaan dan pelatihan kepada semua pelaku usaha kecil termasuk pengrajin kerajinan perak melalui tenaga pelatihan (TPL) dengan datang langsung ke tempat produksi dengan memberikan penyuluhan terkait pendidikan teknik manajerial usaha, pelatihan pembukuan dan penggunaan teknologi tepat guna seperti electroplating pada kerajinan perak. Untuk electroplating ini bisa dikatakan teknologi yang baru dan kebanyakan pengrajin masih menggunakan alat tradisional, namun permasalahan disini banyak pengrajin yang masih belum bisa mengoperasikan alat tersebut karena perlu ketelitian yang sangat tinggi sehingga kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengupayakan dengan memberikan pelatihan agar mampu mengoperasikan alat tersebut dengan baik (untuk gambarnya bisa dilihat dibawah ini pada gambar 3). Namun jika setelah diberikan pelatihan dan penyuluhan tetapi masih belum jelas maka pelaku usaha kecil tersebut dapat langsung datang ke kantor untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut” (wawancara hari Kamis 13 Juni 2013, pukul 14.30 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).



Gambar 4 : Mesin Elektroplating

Pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini selain terjun langsung ke

lapangan juga dapat langsung ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk langsung mendapatkan keterangan jika ada yang belum dimengerti. Adapun pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pada usaha kecil menitikberatkan antara lain:

1) Mengadakan workshop yang bertujuan untuk melatih para pelaku usaha kecil agar dapat lebih terampil dan berinovasi sehingga mampu mendapatkan hasil produksi yang berkualitas yang laku di pasaran. Didalam workshop tersebut terdapat beberapa materi yakni :

- a. Diversifikasi electroplating adalah membuat inovasi produk dengan menggunakan mesin electroplating dengan menciptakan cara melapisi perak tetapi sebenarnya bukan perak.
- b. Menciptakan sebuah produk baru selain perak yakni suasa
- c. Menciptakan desain-desain yang menarik sesuai dengan yang *booming* di pasaran.

2) Mengadakan bimbingan terkait teknik manajerial dengan manajemen usaha dan pelatihan pembukuan. (Sumber: diolah dari hasil wawancara dari Bapak Untung selaku staff bidang industri logam dan mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)

Berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia tersebut maka diharapkan mampu memberikan inovasi dan profesionalisme kepada pengusaha kecil dalam mengembangkan teknik manajerial dan pembukuan, serta pembuatan desain menarik yang diminati di pasar sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai macam kondisi di pasar yang dapat berubah-ubah. Seperti yang

diungkapkan ibu Mustikawati Satatina selaku Kabid Ilmatet Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa:

“langkah yang diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Diklat yang kami lakukan tergantung besarnya anggaran APBD yang ada sehingga sering kali tidak maksimal karena terbatasnya anggaran. Namun walaupun demikian kami lantas tidak menyerah dengan terbatasnya anggaran yang ada sehingga untuk dapat melaksanakan pembinaan itu kami menitik beratkan anggaran sesuai apa yang memang dibutuhkan oleh usaha kecil khususnya pengrajin perak. Biasanya yang kita berikan adalah Diklat Manajerial dan pengembangan desain karena sering kali pada dua faktor tersebut para pengrajin sering mengalami kendala. Masih terbatasnya sumber daya manusia mengenai pengembangan desain membuat hasil produksi dari kerajinan perak ini belum dapat maksimal karena peminat kerajinan perak ini tentunya akan meminta desain yang sedang trend di pasaran seperti model-model perhiasan yang diminati oleh anak muda. Sedangkan biasanya untuk peminat dari luar negeri mereka cenderung meminta desain kuno seperti perhiasan pada jaman kerajaan. Sedangkan untuk materi lain yang diberikan adalah pelatihan manajerial dengan memberikan cara-cara dalam mengelola dan memasarkan hasil produksi, serta manajemen keuangan yang meliputi pembukuan” (wawancara hari Kamis 13 Juni 2013, pukul 14.30 di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).

Perlunya pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia ini dinilai dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pengrajin perak karena akan memunculkan inovasi, kreatifitas dan kemauan yang besar dalam mengembangkan usaha kecilnya agar bisa tumbuh lebih maju. Dengan adanya pelatihan pengembangan desain dan teknik manajerial diharapkan mampu meningkatkan kualitas produksinya dengan desain-desain yang baru dan diminati oleh pasar selain itu juga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dengan manajemen yang baik. pembinaan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk menambah wawasan dari pengrajin perak seperti yang diungkapkan oleh Bapak Purbo

“untuk pelatihan/diklat pembinaan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto saya pernah

mengikuti, di dalam pembinaan tersebut materi yang diberikan adalah teknik manajerial untuk mengelola usaha dan pelatihan pengembangan desain. Mengenai teknik manajerial itu sangat membantu kami, namun untuk pengembangan desain saya nilai yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tidak banyak membantu karena desain yang diberikan tidak mewakili pasar atau masih tradisional. Namun lumayan juga untuk menambah wawasan para pengrajin perak. Selain mengikuti pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, saya juga pernah mengikuti pelatihan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim mewakili Kabupaten Mojokerto. bahkan disana saya sudah dibiayai dan di fasilitasi dengan pemberian *stand* untuk memasarkan produk saya di Sidoarjo. Sering juga kemarin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pusat datang ke Desa Batankrajan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan manajerial dan desain selama 8 hari (wawancara hari senin 17 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB di rumah Bapak Purbo).

Dari penjelasan yang diberikan Bapak Purbo dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto benar-benar melakukan pembinaan dan pelatihan dengan terjun langsung ke lapangan melalui tenaga pelatihan (TPL) untuk memberikan solusi perbaikan dan pendampingan bagi para pengrajin perak namun hal itu masih dirasa sangat kurang karena dalam pembinaan dan pelatihan terkait desain materi yang diberikan sangat tidak membantu, akibatnya banyak pengrajin yang sekedar hanya menganggap untuk menambah wawasan saja. Disamping mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, pengrajin perak Desa Batankrajan juga mendapatkan pembinaan dan pelatihan baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur maupun Kemeperindagkop Pusat untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga selain inovatif juga memiliki wawasan yang luas dalam mengembangkan kerajinan perak ini.

d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha

1. Peningkatan Kemudahan Dalam Layanan Perijinan

Pengembangan suatu usaha secara formal membutuhkan dukungan dari birokrasi setempat, dukungan dari birokrasi tersebut guna membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Bila kita berbicara masalah industri kecil menengah, usaha kecil ini sangat perlu untuk diperhatikan, karena usaha kecil ini sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat yang rata-rata adalah kelas menengah kebawah.

Meningkatkan kuantitas usaha kecil dan menengah untuk mencapai kestabilan ekonomi terutama dari akar rumput adalah suatu keharusan, usaha kecil menengah bila diperhatikan secara serius akan dapat mengangkat perekonomian lokal, serta membawa manfaat lain khususnya menjadi suatu identitas bagi daerah dari kreatifitas pelaku UKM dalam menghasilkan suatu produk.

Di Desa Batankrajan kecamatan Gedeg, secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini ada kenaikan yang signifikan dalam bertambahnya jumlah pengusaha pengrajin perak, bila sejak pertama kali muncul hanya ada satu orang pengusaha, sekarang telah berkembang menjadi 22 pengusaha dengan nama usaha yang berbeda-beda, tetapi mereka mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada satu bidang usaha yang sama, yaitu kerajinan perak. Bertambahnya pengusaha tersebut disebabkan karena adanya kemudahan dalam mendirikan usaha yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, pemberian kemudahan di dalam pendirian usaha tersebut adalah suatu program dari dinas agar masyarakat di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Gedeg terangsang untuk menambah jumlah pengusaha yang bergerak dalam kerajinan perak.

Perhatian yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini adalah suatu bentuk perhatian agar masyarakat di Kecamatan Gedeg dapat terangkat ekonominya khususnya bagi mereka yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setidaknya dapat mencoba untuk menekuni bidang ini.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Untung selaku pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang mengawal bidang Industri, Logam dan Mesin, dituturkan bahwasannya.

“Selama ini pihak kami telah berupaya membantu masyarakat, khusus untuk kerajinan perak. Bagi mereka yang mau mendirikan usaha ini, kami berikan kemudahan dalam pengurusan ijin mendirikan usaha sampai mereka menerima surat izin dan legalisasi usaha, agar secara hukum mereka punya posisi yang kuat. Sebenarnya tujuan utama adalah untuk merangsang tumbuhnya minat bagi masyarakat, agar semakin menekuni usaha ini. Karena kita mengharapkan untuk tahun-tahun kedepan Industri kerajinan perak bisa menjadi industri unggulan di Kabupaten Mojokerto” (wawancara hari Kamis 13 Juni 2013 pukul 14.00 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).

Jelas bahwasannya pemberian kemudahan dalam perijinan ini adalah salah satu usaha, salah satu perhatian Dinas kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto agar meningkatkan usaha kerajinan perak ini, karena diharapkan dengan berkembangnya usaha ini dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal untuk masyarakat serta Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan.

2. Penguatan Kelembagaan

Inti dari pemberdayaan adalah menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Untuk itu pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berusaha

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Disamping tangguh dan mandiri, diharapkan usaha kerajinan perak ini mampu menghadapi kondisi pasar yang penuh persaingan sehingga tidak hancur ditengah jalan serta mampu memberikan perluasan kesempatan kerja dan usaha serta dapat meningkatkan pendapatan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Untung selaku staff bidang industri logam dan mesin.

“Inti dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terhadap pengrajin kerajinan perak yaitu agar pengrajin kerajinan perak mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan mampu mengembangkan dan mempertahankan usahanya agar tetap tangguh menghadapi gempuran dan persaingan pasar global. Jika dilihat usaha kerajinan perak ini sudah dapat dikatakan tangguh, karena selama beberapa tahun masih tetap saja ada dan bahkan mampu memperluas pemasaran dengan berani menerima pesanan dengan jumlah besar. Namun walaupun demikian tetap saja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tidak akan melepaskan begitu saja bahkan diperlukan perhatian khusus supaya hasil kerajinan perak ini tetap ada dan mampu menjadi produk unggulan daerah Kabupaten Mojokerto” (wawancara hari Kamis 13 Juni 2013 pukul 14.00 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).

Melalui Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan kerajinan perak yang mereka hasilkan, pengrajin mampu meningkatkan taraf hidup kehidupan keluarganya disamping itu kerajinan perak ini masih mampu bertahan dan bersaing di pasar global bahkan pengrajin perak mampu memasarkan bukan hanya di wilayah lokal namun sudah menembus negara lain. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menganggap bahwa usaha kerajinan perak ini sangat berpotensi untuk mewakili daerah baik ditingkat nasional maupun internasional, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah agar dapat menjadi produk unggulan daerah. Untuk dapat menjadikan seperti apa yang diharapkan maka pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Mojokerto berperan untuk menguatkan kelembagaan pengrajin perak sehingga akan lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi tekanan dan persaingan pasar global. Disamping itu dengan penguatan kelembagaan, pengrajin akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam usahanya seperti modal, pemasaran maupun manajemen karena semua itu akan dibantu oleh kelompok usaha sehingga akan lebih mampu mengembangkan usahanya. Dalam hal ini kelompok usaha tersebut terbentuk karena terjadi ketimpangan antara pengrajin satu dengan yang lain sehingga akhirnya untuk mengatasi hal tersebut supaya bisa berkembang dan maju semuanya maka dibentuklah kelompok usaha dengan nama Majapahit Jewelry. Penjelasan tersebut juga diungkapkan oleh ibu sutriani selaku Kasi Pemerintahan Di desa Batankrajan yakni:

“untuk sekarang kerajinan perak di Desa Batankrajan cukup dikenal baik di wilayah nasional maupun internasional sehingga pengrajin mulai dapat menikmati hasilnya dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Melalui pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto kerajinan perak semakin dikenal dan semakin kuat. Namun walaupun demikian permasalahan masih tetap ada, sehingga untuk menangani permasalahan di kalangan pengrajin maka dibentuklah kelompok usaha Majapahit Jewelry untuk mengakomodir dan mengkoordinasi anggota-anggotanya dalam mengembangkan usahanya” (wawancara hari jumat, 14 Juni 2013 pukul 10.00 di kantor kelurahan desa Batankrajan).

Melalui hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa melalui pemberdayaan pada sentra industri kerajinan perak ini membuat solid para pengrajin perak dalam membantu sesama pengrajin yang mengalami kesulitan, baik modal, manajemen, pengetahuan tentang Desain dan teknologi. Kebersamaan itu terbukti dengan dibentuknya KUB Majapahit Jewelry. KUB ini sendiri adalah singkatan dari Kelompok Usaha Bersama yang semua anggotanya adalah sesama pengrajin kerajinan perak, yang hal itu dapat dilihat pada Tabel 7.

Pada dasarnya kelompok usaha ini terbentuk masih baru yakni pada 01 desember 2011 dan tujuan dibentuknya kelompok usaha ini adalah untuk meningkatkan eksistensi kelompok masyarakat yang melakoni usaha sebagai produsen perhiasan perak agar semakin diakui oleh dunia serta dapat meningkatkan omzet pemasaran produk mereka. Disamping itu melalui kelompok usaha ini dapat membantu permasalahan-permasalahan yang dialami sesama anggotanya seperti pinjaman modal, kekurangan bahan baku, tempat pemasaran dll. Melalui kelompok usaha bersama ini dapat mewakili pengrajin perak untuk mendapatkan solusi mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan meminta rekomendasi dan berkonsultasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Pemerintah bersama dengan KUB nantinya akan berperan sebagai fasilitator yaitu bekerjasama melakukan pembinaan dan bantuan-bantuan untuk menangani permasalahan yang ada dan mengembangkan sentra kerajinan perak di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto agar mampu menjadi produk unggulan. Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Rohman selaku pengurus KUB (Kelompok Usaha Bersama) Majapahit Jewelry yakni :

“jika ditanya peran pemerintah terhadap nasib pengrajin itu ada karena tanpa bantuan dan kehadiran pemerintah maka dapat dipastikan pengrajin perak akan hilang satu persatu. Walaupun saat ini pengrajin perak desa batankrajan tidak sebanyak ketika awal kemunculannya, namun kami tetap berharap bisa bertahan. Semua itu bergantung juga pada hati nurani pengrajin untuk mau mempertahankan identitas desa yang melekat sebagai sentra kerajinan perak. Melalui kerjasama pemerintah yang diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan KUB Majapahit Jewelry terkait pembinaan manajemen dan modal usaha membuat pengrajin mampu mengatur pengelolaan keuangan usahanya dengan baik yakni mampu memisahkan antara biaya rumah tangga dengan biaya yang dibutuhkan untuk produksi kerajinan perak. Dengan demikian diharapkan mereka masih bisa eksis kedepannya” (wawancara hari senin 17 Juni 2013 Pukul 13.00 WIB di rumah Bapak Rohman)..

Melalui pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa peran yang diberikan oleh pemerintah masih ada dan tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai fasilitator, bersama dengan KUB Majapahit Jewelry mereka berusaha untuk membina pengrajin perak menjadi pengrajin yang inovatif dan mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga kedepannya kerajinan perak ini dapat menjadi identitas dan produk unggulan Kabupaten Mojokerto yang disegani baik di Indonesia maupun internasional.

Tabel 7

Penguatan Kelembagaan Pengrajin Perak

Majapahit Jewelry



No	Nama Pemilik	Posisi
1.	MATARI SILVER (Matari)	Ketua
2.	VIRGO SILVER (Rohman)	Pengurus / bendahara
3.	ENSI SILVER (Supii)	Pengurus
4.	BANDI SILVER (Danuji)	Pengurus
5.	Basman Silver (Basman)	Pengurus
6.	Kombang Silver Kombang Sochwan	Pendiri & Anggota
7.	Anam Silver Anam	Pendiri & Anggota
8.	Agung Silver	Pendiri & Anggota

No	Nama Pemilik	Posisi
	(Purbo)	
9.	Nuraji Silver (Nuraji)	Anggota
10.	Sahar Silver (Sahar)	Anggota
11.	Syakur Silver (Syakur)	Anggota
12.	SUKIRNO SILVER Sukirno	Anggota
13.	MUJIONO SILVER Mujiono	Anggota
14.	SAHIDAN SILVER Sahidan	Anggota
15.	JIMO SILVER Masfudin / Jimo	Anggota
16.	SUTAKIM SILVER Sutakim	Anggota
17.	WITO SILVER Suwanto / Wito	Anggota
18.	WALUYO SILVER Waluyo	Anggota
19.	EDI SILVER Edi Santoso	Anggota
20.	JOKO SILVER Joko Purnomo	Anggota
21.	SAKUWAN SILVER Sakuwan	Anggota
22.	MAHFUDIN SILVER Mahfudin	Anggota

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto 2012

2. Keberdayaaan UKM Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto

a. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin

Adanya industri kerajinan perak di desa Batankrajan ini tampaknya membawa pengaruh sosial baik antara para pengrajin dengan pengrajin lainnya. Dalam hal ini pengaruh yang nampak adalah hubungan yang terjalin semakin erat karena dengan adanya sentra sebagai pusat pengolahan sampai barang jadi semakin mudah dalam berkomunikasi dengan pengrajin lainnya. Para pengrajin juga bisa bekerjasama, bertukar pendapat, bersaing secara sehat, saling membantu dalam proses produksi dan sebagainya. Untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terus berupaya melaksanakan pemberdayaan bagi industri kecil dan industri rumah tangga agar bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih meningkat dari sebelumnya.

Seiring dengan membaiknya peranan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan pelatihan membuat industri kerajinan perak juga berkembang dan mulai meningkat hal itu terwujud dengan adanya peningkatan pendapatan dari pengrajin. Berawal dari modal sendiri dan ilmu yang didapat dari merantau mereka memberanikan diri untuk membuka usaha, dan yang awal kemunculannya hanya berkisar 6 sampai 7 unit usaha pada satu desa kemudian berkembang menjadi 22 unit usaha. Hal ini membuat Pemerintah Daerah sedikit memberi perhatiannya pada industri kerajinan perak ini. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sedikit banyak telah membawa dampak yang begitu besar terhadap peningkatan pendapatan. Hal itu dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan hidup yang lebih

baik dari para pengrajin. Kebutuhan tersebut baik yang sifatnya primer atau sekunder seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan pendidikan. Adanya peningkatan pendapatan rumah tangga telah berpengaruh pada perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Batankrajan khususnya pengrajin. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Purbo yaitu

“dampak yang diberikan dari pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selain bisa menambah wawasan dalam mengelola usaha kerajinan perak juga dapat meningkatkan pendapatan kami. Lewat pembinaan pengembangan pemasaran dan melalui pameran-pameran yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto membuat pesanan terhadap kerajinan perak kami semakin meningkat alhasil pendapatan kami juga meningkat drastis. Sekarang melalui kerajinan perak ini saja kami mampu menyekolahkan anak saya hingga bangku perkuliahan selain itu kami bisa membangun rumah yang layak dan membeli perabotan rumah. Jika kebanjiran order kami sebulan mampu meraup keuntungan sekitar 9-10 juta Rupiah jika pasaran sedang biasa-biasa saja namun jika kebanjiran order maka sebulan kami bisa dapat 37 juta rupiah. Dulu sebelum adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto kami masih kesulitan untuk memasarkan kerajinan kami karena hanya di pasarkan di galeri-galeri dengan manual dan hasil yang kami dapatkan juga masih pas-pasan namun setelah dilakukan pameran dan pemasaran lewat website maka pendapatan kami melonjak sangat drastis karena konsumen lebih mudah menghubungi kami” (wawancara hari senin 17 Juni pukul 10.00 WIB di rumah bapak purbo).

Melalui hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa para pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan telah merasakan perubahan setelah adanya pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto karena pembinaan tersebut mampu memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan pengrajin kerajinan perak. Perubahan yang dirasakan itu antara lain peningkatan taraf pendapatan ekonomi yang bisa dilihat dari gaya hidup. Hal ini bisa dilihat dari adanya kepemilikan barang seperti motor, perabot rumah tangga, barang-barang elektronik, rumah dan lain-lain. Selain itu tingkat pendapatan pengrajin perak dapat dibuktikan lewat tabel berikut.

Tabel 8

Omset Pengrajin Kerajinan Perak Desa Batankrajan Th. 2012

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		Omset / Pendapatan Perbulan
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	
1.	AGUNG SILVER Purbo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	29,000,000	420 kg	3,000,000	37.000.000
2.	ENSI SILVER Supii	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	36 kg	684,000	4.800.000
3.	VIRGO SILVER Rohman	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	36 kg	684,000	4.800.000
4.	ANAM SILVER Anam	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	20,000,000	36 kg	684,000	4.800.000
5.	BANDI SILVER Danuji	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	15,000,000	36 kg	684,000	4.800.000
6.	NURAJI SILVER Nuraji	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	2.400.000
7.	MATARI SILVER Matari (0856 4913 9519)	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		Omset / Pendapatan Perbulan
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	
8.	SAHAR SILVER Sahar Siswoyo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
9.	SYAKUR SILVER M. Syakur	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
10.	SUKIRNO SILVER Sukirno	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
11.	MUJIONO SILVER Mujiono	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
12.	SAHIDAN SILVER Sahidan	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	3 kg	84,000	650.000
13.	JIMO SILVER Masfudin / Jimo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	3 kg	84,000	650.000
14.	SUTAKIM SILVER Sutakim	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
15.	WITO SILVER Suwanto / Wito	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		Omset / Pendapatan Perbulan
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	
16.	WALUYO SILVER Waluyo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	14,000,000	3 kg	84,000	650.000
17.	EDI SILVER Edi Santoso	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
18.	JOKO SILVER Joko Purnomo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
19.	SAKUWAN SILVER Sakuwan	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	14,000,000	4 kg	115,000	800.000
20.	MAHFUDIN SILVER Mahfudin	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	650.000
21.	Basman Silver Basman	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	2.400.000
22.	Kombang Silver Kombang	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	2.400.000

Sumber : KUB Mojopahit Jewelry 2012

b. Pemasaran Hasil Usaha

Semua industri kecil jika diperhatikan dengan lebih teliti maka semuanya pasti akan menempati posisi yang strategis demi terciptanya pembangunan nasional yang merata di semua wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan suatu hal yang demikian maka pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto harus dapat mengoptimalkan potensi usaha kecil yang ada salah satunya adalah kerajinan perak di Desa Batankrajan yang berpotensi dapat menjadi produk unggulan daerah. Untuk mewujudkan semua itu perlu adanya perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait pemasaran hasil usaha sehingga nantinya akan lebih dikenal lagi baik dipasar lokal maupun pasar internasional.

Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait pemasaran hasil usaha telah banyak diupayakan melalui kerjasama dengan Disperindag daerah lain untuk menyelenggarakan pameran perhiasan yang diikuti oleh pengrajin perhiasan salah satunya pengrajin perak Desa Batankrajan, disamping itu juga diadakan pembinaan dan pelatihan penggunaan website sebagai sarana untuk memasarkan produk mereka. Dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan tersebut adalah konsumen lebih mudah dalam memesan kerajinan perak Desa Batankrajan sehingga berujung pada meningkatnya kegiatan produksi dan semakin luasnya pasar kerajinan perak. Biasanya pesanan kerajinan perak yang paling banyak adalah wilayah lokal Jawa timur sendiri dan kemudian di pasarkan di galeri-galeri di Bali namun setelah adanya pembinaan dan pelatihan penggunaan website pemasaran hasil usaha

mereka mampu menjangkau seluruh nusantara dan internasional. Hal itu diperkuat dengan penjelasan Bapak Purbo :

“ya memang setelah adanya pemberdayaan terkait pelatihan dan penggunaan website serta pameran-pameran yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto pesanan kami semakin meningkat terutama daerah-daerah timur seperti NTT, NTB, Sulawesi bahkan sampai Papua yang selama ini belum masuk jangkauan kami. selain itu untuk pesanan dari luar negeri yang paling banyak adalah italia, jerman dan prancis. Semua itu kebanyakan tahu lewat website setelah itu untuk harganya kami bernegosiasi lewat email atau telfon. Untuk pemasaran yang manual artinya dengan menaruh barang-barang produksi kami biasanya menaruh barang tersebut di galeri-galeri bali dan Solo. Jika pesanan terus stabil seperti ini tidak menutup kemungkinan kami masih bisa bertahan dan menjadi produk unggulan daerah. Disamping itu taraf hidup keluarga kami akan meningkat karena omset yang kami terima juga besar, namun dampak terbesarnya adalah dapat memotivasi anak-anak muda untuk melanjutkan usaha kami” (wawancara hari senin 17 Juni pukul 10.00 WIB di rumah bapak purbo).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemasaran hasil usaha pengrajin perak Desa Batankrajan semakin meningkat hal itu juga tidak terlepas dari peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam mengembangkan potensi perak sebagai produk daerah. untuk membuat konsumen semakin percaya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mendorong pengrajin untuk mempertahankan kualitas produknya sehingga konsumen benar-benar memilih produk ini, selain itu dengan kualitas produk yang bagus maka diharapkan pemasaran produk ini bisa lebih luas di pasar internasional. Hal itu bisa kita lihat melalui tabel mengenai pemasaran produk perak baik di pasar lokal maupun internasional.

Tabel 9

Data Tingkat Pemasaran Pengrajin Kerajinan Perak Desa Batankrajan Th. 2012

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		% Pemasaran	
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	Lokal	Ekspor
1.	AGUNG SILVER Purbo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	29,000,000	420 kg	3,000,000	90	10
2.	ENSI SILVER Supii	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	36 kg	684,000	100	0
3.	VIRGO SILVER Rohman	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	36 kg	684,000	100	0
4.	ANAM SILVER Anam	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	20,000,000	36 kg	684,000	100	0
5.	BANDI SILVER Danuji	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	15,000,000	36 kg	684,000	100	0
6.	NURAJI SILVER Nuraji	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	100	0
7.	MATARI SILVER Matari (0856 4913 9519)	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		% Pemasaran	
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	Lokal	Ekspor
8.	SAHAR SILVER Sahar Siswoyo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
9.	SYAKUR SILVER M. Syakur	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
10.	SUKIRNO SILVER Sukirno	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
11.	MUJIONO SILVER Mujiono	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
12.	SAHIDAN SILVER Sahidan	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	3 kg	84,000	100	0
13.	JIMO SILVER Masfudin / Jimo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	3 kg	84,000	100	0
14.	SUTAKIM SILVER Sutakim	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
15.	WITO SILVER Suwanto / Wito	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
16.	WALUYO SILVER Waluyo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	14,000,000	3 kg	84,000	100	0

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		% Pemasaran	
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	Lokal	Ekspor
17.	EDI SILVER Edi Santoso	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
18.	JOKO SILVER Joko Purnomo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
19.	SAKUWAN SILVER Sakuwan	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	14,000,000	4 kg	115,000	100	0
20.	MAHFUDIN SILVER Mahfudin	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	100	0
21.	Basman Silver Basman	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	100	0
22.	Kombang Silver Kombang	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	100	0

Sumber : KUB Mojopahit Jewelry 2012

c. Jumlah Tenaga Kerja

Keberadaan industri kecil kerajinan perak di Desa Batankrajan cukup memberikan pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yaitu terbukanya lapangan kerja baru dalam sektor industri kecil kerajinan perak sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk bekerja di sektor tersebut. Sektor swasta dan pertanian sudah tidak mampu lagi menyerap banyak tenaga kerja, disamping itu jika ingin mendirikan suatu usaha, modal yang diperlukan juga tidak sedikit sementara jumlah buruh dan pengangguran semakin banyak sehingga banyak penduduk yang mulai mencari alternatif pekerjaan lain. Salah satu sektor yang dianggap bisa menyerap tenaga kerja dan padat karya adalah industri kerajinan perak. Keberadaan industri kerajinan perak Desa Batankrajan ini dianggap masyarakat setempat telah mampu sedikit memberikan lapangan kerja baru. Kesempatan kerja dalam industri kerajinan perak ini dapat berupa menjadi tenaga kerja dapat juga ikut mengembangkan menjadi pengrajin juga. Oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selaku Fasilitator juga tidak tinggal diam, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto melalui TPL (tenaga pelatihan lapangan) berkoordinasi dengan pengrajin untuk memberikan motivasi dan mendidik anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan agar bisa menjadi pengrajin yang inovatif dan kreatif. Tidak dapat dipungkiri keberadaan industri kerajinan perak ini mampu memberikan kesempatan kerja baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai pekerjaan sampingan. Dengan adanya industri kerajinan perak ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Desa tersebut.

Keberadaaan industri kerajinan perak ini sejak dulu sampai sekarang mempunyai pengaruh yang tidak kecil bagi masyarakat Desa Batankrajan. Dikatakan oleh Bapak Purbo dampak yang dirasakan sampai saat ini adalah besarnya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri kerajinan perak Desa Batankrajan ini. Di awal kemunculannya tahun 1987-an kerajinan perak ini mampu menyerap sekitar 80 % pengangguran di Desa Batankrajan. Seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“setelah pulang merantau dari bali itu ya bisa dikatakan pengangguran di Desa ini mencapai 80%, setelah saya dan teman-teman coba mengadopsi pembuatan kerajinan perak di Bali untuk diterapkan disini hasilnya sungguh luar biasa. Pengangguran di Desa ini perlahan mulai terserap, sehingga anak-anak muda yang memasuki usia produktif dapat tertampung dan memiliki pekerjaan. Saat itu saja pegawai yang saya miliki sekitar 32 orang, karena pesanan yang saya terima sangat banyak. Namun untuk sekarang pegawai saya hanya 18 orang, selain karena bahan baku yang mahal juga banyak pegawai yang saya dorong dengan berkoordinasi dengan TPL dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto agar ikut menjadi pengrajin perak juga” (wawancara hari senin 17 Juni Pukul 10.00 WIB di rumah bapak purbo).

Demikian pernyataan bapak purbo berkaitan dengan kontribusi industri kerajinan perak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya industri kerajinan perak ini menjadikan banyak angkatan kerja yang masih dalam usia sangat produktif bisa masuk ke sektor tersebut baik jadi pengrajin atau menjadi pegawai. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran bisa lebih ditekan. Pernyataan serupa juga diungkapin oleh Bapak Sochwan selaku perintis UKM kerajinan perak saat disinggung mengenai tenaga kerja yang digunakan dalam usaha kerajinan perak di Desa Batankrajan. Penjelasan bapak Sochwan adalah sebagai berikut:

“untuk tenaga kerja saya menggunakan tenaga kerja dari Desa Batankrajan sendiri selain bisa mengurangi pengangguran di Desa ini, saya juga ingin melatih anak-anak muda untuk ikut melestarikan identitas dari desa ini yakni sebagai Desa pengrajin perak. Selain itu melalui usaha ini

setidaknya secara total dari semua ukm kerajinan perak yang ada di Desa Batankrajan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 100 orang dari total jumlah penduduk 2968 jiwa pada 2012. Kalau bisa dikatakan itu masih kecil namun lumayan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Desa Batankrajan ini” (wawancara hari senin 17 Juni 2013 Pukul 14.00 WIB di rumah Bapak Sochwan).

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto melalui TPL nya juga ikut mendorong dan memotivasi para pemuda Desa Batankrajan untuk bisa meneruskan menjadi pengrajin perak karena melalui usaha kerajinan perak yang padat karya ini memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja baru di sektor tersebut. Semua itu dapat dibuktikan lewat tabel berikut.

Tabel 10

Jumlah Tenaga Kerja Kerajinan Perak Desa Batankrajan Th. 2012

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		Jumlah Tenaga Kerja
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	
1.	AGUNG SILVER Purbo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	29,000,000	420 kg	3,000,000	18
2.	ENSI SILVER Supii	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	36 kg	684,000	2
3.	VIRGO SILVER Rohman	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	36 kg	684,000	6
4.	ANAM SILVER Anam	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	20,000,000	36 kg	684,000	4
5.	BANDI SILVER Danuji	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	15,000,000	36 kg	684,000	6
6.	NURAJI SILVER Nuraji	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	1
7.	MATARI SILVER Matari (0856 4913 9519)	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		Jumlah Tenaga Kerja
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	
8.	SAHAR SILVER Sahar Siswoyo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
9.	SYAKUR SILVER M. Syakur	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
10.	SUKIRNO SILVER Sukirno	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
11.	MUJIONO SILVER Mujiono	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
12.	SAHIDAN SILVER Sahidan	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	3 kg	84,000	4
13.	JIMO SILVER Masfudin / Jimo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	16,000,000	3 kg	84,000	5
14.	SUTAKIM SILVER Sutakim	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
15.	WITO SILVER Suwanto / Wito	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4

No.	Nama Perusahaan (Pemilik)	Alamat	Nilai Investasi (Rupiah)	Kapasitas Produksi		Jumlah Tenaga Kerja
				Prod.	Nilai (ribuan Rupiah)	
16.	WALUYO SILVER Waluyo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	14,000,000	3 kg	84,000	5
17.	EDI SILVER Edi Santoso	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
18.	JOKO SILVER Joko Purnomo	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
19.	SAKUWAN SILVER Sakuwan	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	14,000,000	4 kg	115,000	5
20.	MAHFUDIN SILVER Mahfudin	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	3 kg	84,000	4
21.	Basman Silver Basman	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	4
22.	Kombang Silver Kombang	Ds. Batankrajan Kec. Gedeg	12,000,000	24 kg	456,000	4

Sumber : KUB Mojopahit Jewelry 2012

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak agar mampu menjadikan perak sebagai produk unggulan daerah

1) Faktor Pendukung

UKM kerajinan perak Desa Batankrajan merupakan UKM yang bisa dikatakan sebagai UKM yang sangat potensial yang melalui produk perhiasannya mampu menembus pasar global baik lokal maupun internasional disamping itu mampu menjadikannya sebagai produk unggulan daerah. Untuk dapat mencapai tahap seperti demikian maka perlu adanya faktor pendukung dari usaha tersebut. Faktor pendukung dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak agar mampu menjadikan perak sebagai produk unggulan daerah adalah sebagai berikut :

a. Tenaga Kerja Yang Cukup Banyak

Dilihat dari kondisi masyarakat yang ada di Desa Batankrajan dapat dikatakan bahwa kondisi yang ada sangat mendukung untuk meningkatkan potensi kerajinan perak yang ada di Desa Batankrajan, hal tersebut dapat terlihat dari cukup tersedianya tenaga kerja yang diperlukan disamping biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja yang cukup terjangkau. Dengan adanya kondisi demikian akan menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi industri kerajinan perak selain tidak perlu susah-susah mencari tenaga kerja dari luar desa, juga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Batankrajan itu sendiri. Untuk saat ini saja dari total 2968 jiwa, yang bekerja menjadi buruh ada sekitar 339 dan sisanya 188 masih belum memiliki pekerjaan, dengan adanya industri kerajinan perak ini diharapkan tenaga buruh yang ada tidak perlu keluar untuk mencari pekerjaan di kota dan cukup bisa bekerja di

Desanya sendiri selain itu dapat juga mengurangi pengangguran yang melanda anak-anak muda usia produktif. Melalui industri kerajinan perak ini setidaknya dalam setahun dapat tertampung sekitar 100 lebih anak-anak muda usia produktif, disamping kinerjanya yang bagus juga dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pasar. Semua tenaga kerja tersebut diperoleh dari anak-anak muda Desa Batankrajan itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Purbo selaku pelaku usaha kerajinan perak di Desa Batankrajan, beliau mengatakan bahwa:

“ya sampai sekarang usaha ini masih tetap bisa berjalan karena disini sangat mudah mencari tenaga kerja, apalagi usia-usia produktif seperti lulusan SMA. Dengan tenaga kerja seperti itu kami dapat memenuhi permintaan pasar karena konsumen biasanya menginginkan barangnya secara cepat, hasilnya halus dan berkualitas. Selain itu dengan tertampungnya anak-anak muda usia produktif seperti di usaha saya dan teman-teman yang membuat kerajinan perak secara tidak langsung kami mengurangi jumlah pengangguran di Desa ini dan mengurangi antusias warga yang ingin bekerja di luar desanya. Dengan semakin antusiasnya anak-anak muda yang menjadi tenaga kerja di usaha kami maka hal itu juga dapat menjadi media untuk terus mengembangkan dan melestarikan kerajinan perak ini agar tidak luntur dan juga membuat anak-anak muda yang telah mahir bisa berinovasi membuka usaha sendiri untuk menjadi pengrajin perak” (wawancara hari senin 17 Juni pukul 10.00 WIB di rumah bapak purbo).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melalui tenaga kerja yang melimpah menjadikan kemudahan dalam mengembangkan kerajinan perak ini sehingga sampai saat ini kerajinan perak di Desa Batankrajan masih bisa tetep produksi. Disamping itu dengan tertampungnya warga desa Batankrajan sebagai tenaga kerja maka dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut selain itu juga dapat menambah penghasilan warga sebagai usaha sampingan.

b. Masih Belum Banyak Pesaing Yang Memiliki Usaha Yang Sama

Setiap usaha baik usaha kecil maupun besar pasti ada pesaing yang itu akan menjadi penghambat bagi pengembangan dan perluasan usaha. Namun, semua hambatan itu menjadi pengecualian untuk industri kerajinan perak di Desa Batankrajan ini. Dilihat dari data yang ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, sebagian besar pengrajin kerajinan perak terpusat di Kecamatan gedeg yakni terletak di Desa Batankrajan, dengan jumlah sebanyak 22 unit dan jumlah tenaga kerja 104 orang. Jika dibandingkan dengan total jumlah masyarakat Desa Batankrajan yang ada tenaga kerja yang terserap masih sedikit sekali namun hal tersebut tidak meruntuhkan semangat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Untuk memberdayakan industri kerajinan perak ini karena merupakan usaha yang padat karya, hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Untung selaku staff bidang industri logam dan mesin yakni :

“industri kerajinan perak ini jika dilihat memiliki potensi dan peluang yang besar dalam memperluas jangkauan pasar hal tersebut dapat dilihat bahwa Desa Batankrajan merupakan pusat produksi kerajinan perak sehingga saingannya belum banyak. Sekarang kami berupaya bagaimana kerajinan perak ini bisa lebih dikenal baik di wilayah domestik maupun mancanegara”(wawancara hari Kamis 13 Juni 2013 pukul 14.00 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa potensi industri kerajinan perak ini sangat besar selain diminati dan memiliki jangkauan pasar yang luas, industri ini juga belum banyak memiliki pesaing dari wilayah lain. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pemberdayaan terhadap industri kerajinan perak tersebut. Jika industri kerajinan perak ini diberdayakan

dan digerakkan dengan sungguh-sungguh secara maksimal maka tidak menutup kemungkinan suatu saat akan bisa menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

2) Faktor Penghambat

a. Mahalnya Harga Bahan Baku

Industri kecil merupakan industri yang mana sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku di pasaran, jika bahan baku susah didapat maka yang didapat adalah harga yang sangat mahal untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Jika harga sebuah bahan baku tersebut mahal maka proses produksi akan terhambat dan harga dari kerajinan tersebut akan melonjak namun konsumen tidak akan mampu membeli. Dalam hal ini maka pengrajin hanya bisa berharap pada pemerintah untuk dapat menstabilkan harga atau menyediakan bahan baku yang terjangkau bagi pengrajin.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembinaan terhadap industri kecil kerajinan perak adalah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan pelimpahan wewenang kepada bagian ILMATET. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam Sumber Daya Manusia yang dirasakan dalam pembinaan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia dalam pembinaan.

Pada umumnya para pengrajin kerajinan perak ini tidak mempunyai latar pendidikan yang tinggi, mereka hanya mengandalkan ketrampilan mereka secara otodidak saja dalam menjalankan usaha mereka. Begitu juga dalam perekrutan pegawai, para pengrajin hanya merekrut anak-anak muda disekitarnya yang sudah tidak sekolah atau orang-orang yang sudah tidak bekerja. Mereka tidak

mengambil orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya yakni kerajinan perak. Rata-rata pekerja diajari oleh pemilik atau pengrajin yang ada dengan menggunakan pembelajaran dari dasar atau hanya ketrampilan yang spesifik untuk para pekerja saja.

c. Terbatasnya Modal

Bagi pelaku industri kecil, keberadaan modal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Karena kurangnya modal bisa menjadi penghambat bagi perkembangan industri kecil tersebut. Untuk dapat terus produksi, setiap pengrajin selalu membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membeli bahan baku. Modal dalam hal ini merupakan suatu faktor yang cukup penting karena dengan adanya modal yang cukup maka kebutuhan untuk menjalankan usaha akan lebih baik misalnya digunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan lainnya. Walaupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam memberdayakan telah berupaya mencari beberapa akses permodalan untuk membantu memecahkan permasalahan aspek permodalan bagi pelaku industri kecil seperti pengrajin kerajinan perak. Seperti yang diungkapkan Bapak Rohman selaku Pengurus KUB Majapahit Jewelry dan pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan adalah sebagai berikut :

“ Kita sebagai pengrajin kendala yang paling pertama adalah dari modal, jika bahan bakunya mahal kalau kita punya sedikit modal maka bahan yang terbeli hanya sedikit sehingga pesanan banyak yang kita tolak. Modal yang kita butuhkan sangat berpengaruh pada harga bahan baku di pasaran, kalau bahannya mahal maka kita memperoleh sedikit tapi kalau harga bahannya stabil atau turun maka kita dapat memenuhi permintaan yang ada. Selain itu pemesan biasanya juga tidak membayar kontan tetapi masih DP sehingga jika modalnya kecil maka uangnya tidak bisa berputar lagi” (wawancara hari senin 17 Juni 2013 pukul 13.00 WIB di rumah Bapak Rohman).

C. PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Mojokerto

Peran dari pemerintah daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh Arsyad:

(1999:120) ada 4 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu :

- a. Sebagai entrepreneur, bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis.
- b. Sebagai coordinator, bahwa pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi.
- c. Sebagai fasilitator, bahwa pemerintahan daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya.
- d. Sebagai *stimulator*, bahwa pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.

Sesuai dengan konsep diatas, Dinas perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Mojokerto dalam upaya memberdayakan pengrajin kerajinan perak sebagai produk unggulan daerah telah melaksanakan beberapa hal sebagaimana yang tertuang dalam konsep diatas, antara lain: memfokuskan pada sisi entrepreneur. pada sisi ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah melakukan suatu upaya yakni dengan mekanisme penguatan kelembagaan melalui terbentuknya KUB Majapahit Jewelry. Tujuan dari dibentuknya KUB Majapahit Jewelry adalah untuk mengakomodir dan mengkoordinasi anggota-anggotanya dalam mengembangkan usahanya artinya KUB Majapahit Jewelry sebagai wadah untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin kerajinan perak perak terkait modal, pemasaran, dan pengembangan usaha dan produksi. Selain itu KUB Majapahit Jewelry juga

memberikan koordinasi kepada pengrajin satu dan pengrajin lain untuk bersama-sama mengembangkan usaha mereka.

Selain peranannya pada sisi entrepreneur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga memberikan perhatiannya pada sisi koordinator. Sebagai koordinator artinya pemerintah daerah dapat bertindak dengan menciptakan kebijakan. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah membentuk bidang yang berfungsi mengkoordinasi usaha kerajinan perak melalui pengelompokan jenis usaha yang berfokus pada industri logam, mesin, aneka tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika (ILMATET). Hal ini dimaksudkan agar Dinas lebih mudah untuk membina serta mengembangkan usaha kecil sesuai dengan bidang yang ada, selain itu dengan koordinasi yang tersusun secara sistematis sesuai dengan bidang masing-masing, tentunya dinas juga akan lebih mudah dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing bidang yang dikembangkan.

Pengembangan kerajinan perak Desa Batankrajan tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. untuk itu perlu adanya proses pendampingan dari Dinas melalui perwakilannya yakni TPL (tenaga pelatihan lapangan) tujuannya untuk melihat langsung dilapangan terkait proses pengembangan dan produksi kerajinan perak. Selama berada dilapangan TPL memberikan sejumlah pembinaan terkait motivasi pengrajin kerajinan perak dalam mengembangkan kualitas produknya. Selain itu TPL juga memberikan pelatihan desain, menggunakan Website untuk meningkatkan kreativitas agar produksi usaha yang dipasarkan mampu bersaing baik di tingkat lokal, regional maupun mancanegara.

Upaya lain yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk memberdayakan pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah melalui Bantuan Kredit Lunak yang disalurkan lewat Bank BRI melalui programnya yakni KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai upaya dari dinas untuk memberikan stimulus kepada para pengrajin agar usaha yang mereka jalankan tidak saja kuat dari segi finansial tetapi mereka juga akan mampu menangani terbatasnya modal usaha yang memang selama ini menjadi kendala di banyak usaha terutama pada industri kecil di Kabupaten Mojokerto.

Jadi peranan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan dengan cara entrepreneur melalui KUB Majapahit Jewelry, koordinator melalui ILMATET, Fasilitator melalui TPL, Stimulator melalui bantuan kredit lunak (KUR), telah mampu mewujudkan usaha kerajinan perak yang mandiri dan tangguh sebagai identitas daerah dan produk unggulan daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto.

a. Peningkatan Kemampuan Finansial

Dalam sudut pandang manajemen modern dapat diartikan bahwa keuangan atau finansial merupakan salah satu segi fungsional manajemen yang sangat penting selain pemasaran dan produksi. Dengan finansial yang cukup dari suatu usaha dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan suatu produksi, sebaliknya suatu produksi akan terhambat atau berhenti jika kekuatan finansial yang dimiliki suatu usaha tersebut kecil. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kartasmita (1996) bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh semua usaha kecil adalah masalah finansial. Melalui penjelasan seperti itu pemerintah mulai memberikan perhatian dengan menyediakan berbagai macam fasilitas seperti

bantuan kredit lunak. Dengan adanya pemberian bantuan kredit lunak tersebut secara tidak langsung pemerintah telah melakukan perannya seperti yang diungkapkan Arsyad (1999:120) yakni sebagai Stimulator artinya bahwa pemerintah dapat mempercepat dan menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Tindakan tersebut berupa pemberian kredit lunak melalui Bank BRI atau BNI yang bertujuan memotivasi pengusaha industri kecil maupun rumah tangga agar lebih kreatif dan menjaga kualitas produknya sehingga para konsumen tetap percaya pada produk mereka disamping itu dengan adanya bantuan kredit lunak diharapkan tidak ada permasalahan finansial karena pengusaha kecil maupun rumah tangga akan lebih mudah dalam melakukan pinjaman untuk meningkatkan finansial usahanya. Upaya peningkatan finansial usaha tersebut salah satu program pemberdayaan yang dibiayai oleh pemerintah daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk pengrajin kerajinan perak yang disalurkan lewat lembaga perbankan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemberian kredit lunak yang disalurkan Dinas Perindustrian dan perdagangan terhadap Bank BRI atau BNI melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) sedikit banyak telah membantu pengusaha kecil khususnya pengrajin kerajinan perak karena melalui KUR tersebut pengrajin kerajinan perak dapat meningkatkan usahanya melalui pinjaman kepada bank maksimal 30 juta rupiah dengan angsuran selama 2-3 tahun, dan syarat yang diperoleh cukup mudah yakni dengan membawa KTP/KK dan surat keterangan dari desa atau proposal yang telah direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto kepada bank yang terkait. Namun jika menginginkan untuk meminjam

bantuan modal melebihi yang ditentukan maka pemilik usaha dapat membawa jaminan. Penunjukan dua bank tersebut sebagai rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto bukan tanpa alasan, karena cabang-cabang bank BRI dan BNI tersebar diseluruh pelosok daerah tidak terkecuali di wilayah Gedeg sehingga sangat mudah dijangkau oleh para pengusaha kecil seperti pengrajin perak Desa Batankrajan.

Melalui hal tersebut terlihat jelas bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah melakukan perannya sebagai stimulator dengan memberikan pemberdayaan dari aspek peningkatan kemampuan finansial terhadap pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Namun yang terjadi dilapangan berdasarkan data yang diperoleh dari pengrajin kerajinan perak terlihat bahwa banyak yang belum memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait bantuan kredit lunak. Pengrajin masih takut untuk meminjam di Bank dengan alasan bunganya besar, takut tidak dapat membayar tepat waktu dan persyaratan administratifnya yang rumit. Dengan asumsi tersebut pengrajin kerajinan perak enggan untuk meminjam di Bank dan lebih memilih untuk meminjam di kelompok usaha bersama (KUB) dan dealer-dealer resmi yang ada walaupun di dealer tersebut bunganya lebih besar dan memerlukan jaminan. Namun disisi lain pengrajin kerajinan perak yang telah memperoleh bantuan kredit lunak melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) telah merasakan manfaatnya selain tidak takut kehabisan modal mereka juga akan lebih sehat secara finansial.

Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto membuktikan bahwa pemerintah telah merespon dengan baik mengenai kelangsungan perkembangan industri kecil di wilayah Kabupaten Mojokerto. Stimulus dengan memberikan rekomendasi bantuan kredit lunak terhadap lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh dinas merupakan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha industri kecil khususnya kerajinan perak.

b. Pengembangan Pemasaran

- Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar

Selama ini kendala tradisional yang dihadapi oleh para pengusaha terutama yang bergerak di bidang usaha kecil menengah adalah bagaimana memperoleh akses terutama pemasaran produk mereka. Secara logis mereka seringkali mengeluhkan lemahnya akses terutama pasar produksi karena memang akses secara lokal kurang menjangkau laba yang mereka peroleh sehingga modal kembali yang mereka dapatkan relatif kecil. Jadi secara umum memang akses pasar selalu menjadi kelemahan bagi usaha kecil menengah, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Jafar (2004:41) dalam faktor eksternal penghambat Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengembangkan usaha terutama terbatasnya akses pasar. Jafar mengatakan akses pasar yang terbatas akan berakibat pada produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun internasional.

Berarti dampak negatif dari terbatasnya akses pasar secara langsung akan mengakibatkan produksi yang dihasilkan kurang berkembang, jadi hal ini adalah permasalahan yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah Khususnya Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. langkah antisipasi ini secara efektif telah dijalankan oleh dinas melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan maksud untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan kepada pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi untuk menciptakan sebuah inovasi yang baru agar potensi yang dimiliki oleh pengrajin kerajinan perak dapat tertampung dengan baik sehingga mampu menciptakan produk yang berkualitas dan mampu menjadi produk unggulan daerah.

Penciptaan inovasi yang dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk pengembangan UKM adalah melalui pelatihan pengembangan Website dengan bekerjasama dari UPN (Universitas Pembangunan Nasional), langkah ini dilakukan agar para pengrajin dapat menangkap akses pasar dari luar yang belum terjangkau. Tentunya dengan penguasaan terhadap website para pengrajin tidak akan kesulitan memasarkan produksi mereka jika akses sebelumnya sudah tidak memungkinkan sebagai tempat pemasaran, selain itu hal ini akan secara luas menarik minat konsumen baik dari luar daerah Mojokerto serta Jawa Timur bahkan peminat dari mancanegara, khususnya Jerman, Italia dan Prancis. Pemasaran melalui website saat ini dinilai sebagai hal yang biasa, karena pemasaran yang dilakukan bersifat universal, praktis, efektif, efisien. Dalam hal ini baik pasar regional maupun internasional kebanyakan meminati jenis gelang, cincin, kalung dan anting dengan pemesanan lewat telfon dan email yang disertai DP senilai 30-40%. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto secara mandiri juga berusaha membantu para pengrajin perak melalui even-even tertentu misalkan adanya pameran produk

kerajinan perak di berbagai daerah dengan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan daerah lain dengan maksud memperluas jangkauan pemasaran mereka di wilayah lokal sehingga tidak hanya di lingkup Bali, Solo dan Mojokerto saja namun meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan industri kecil khususnya pengrajin perak perlu dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan inovasi dan perluasan pemasaran kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Hambatan terkait pemasaran kerajinan perak ini dikarenakan masih sedikitnya jaringan bisnis yang hanya bergantung pada galeri-galeri yang mereka titipi saja. Namun setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan pihak Universitas dalam membuka akses pemasaran, dampak yang diperoleh adalah semakin terbukanya peluang untuk memperluas pemasaran, walaupun sudah terbuka akses pemasaran yang ada tetapi pengrajin perak juga harus berusaha untuk mencari peluang daerah pemasaran yang baru dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah dalam memajukan usahanya.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam setiap usaha namun disisi lain sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala yang selalu dihadapi oleh usaha kecil di berbagai wilayah di Indonesia, terutama dalam hal kreatifitas, dan inovasi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk sehingga dari waktu ke waktu tidak akan mengalami perubahan kualitasnya, dengan memiliki kedua aspek tersebut akan mampu meningkatkan produktivitas dan dapat menembus pasar global. Melihat

begitu pentingnya kegunaan sumber daya manusia dalam sebuah industri kecil maka pemerintah dalam hal ini perlu mengembangkan sumber daya manusia pengusaha kecil melalui program pemberdayaan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Eko (2002) dalam dua pandangan pemberdayaan yakni Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab Negara. Pemberian layanan publik kepada masyarakat tentu merupakan tugas Negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan memiliki makna terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri.

Melalui dua pandangan pemberdayaan tersebut, tujuannya adalah membuat masyarakat yang mandiri oleh karena itu dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni serta memiliki inovasi yang tinggi. Sehingga segala macam program yang diberikan oleh pemerintah dapat terserap oleh masyarakat dan dapat segera di implementasikan melalui pendirian suatu usaha yang mampu membuat keluarga dan lingkungannya berdaya. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah mengupayakan pemberdayaan dalam mengembangkan sumber daya manusia kepada pengusaha kecil khususnya pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan dengan tenaga pelatihan lapangan (TPL) serta mengadakan workshop untuk pengusaha kecil secara *sustainable*. Kebanyakan

pengrajin perak yang ada di Desa Batankrajan hanya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah yakni hanya sebatas lulusan SMP selain itu pengrajin perak juga mendapatkan kemampuan membuat kerajinan perak dari hasil belajar kepada pengrajin perak di Bali. Secara teknis pengrajin perak mampu membuat kerajinan perak dengan baik tetapi semua itu masih menggunakan teknologi dan desain yang sederhana yakni belum menggunakan teknologi *electroplating*, disamping itu untuk teknik manajerial yang digunakan juga belum dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya proses pembukuan yang kurang teliti dan asal-asalan dengan tidak adanya pencatatan laporan secara terus-menerus atau pencatatan secara periodik terkait produksi dan penjualan barang.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Anoraga dan Sudantoko (2002:225) yang disebutkan dalam karakteristik usaha kecil bahwasannya pada usaha kecil itu, salah satu pointnya menyebutkan bahwa adanya sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya, serta Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

Sementara itu untuk pendidikan dan pelatihan secara umum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan dibantu TPL (Tenaga Pelatihan Lapangan) berfokus pada dua hal inti yaitu workshop dan bimbingan teknik manajerial. Tujuan dari workshop adalah melatih para pelaku usaha kecil agar dapat lebih terampil dan berinovasi sehingga mampu mendapatkan hasil produksi yang berkualitas yang laku di pasaran. Adapun materi yang disampaikan terutama bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada para pengrajin perak terkait Diversifikasi electroplating adalah membuat inovasi produk dengan menggunakan mesin electroplating dengan menciptakan cara melapisi perak tetapi sebenarnya bukan perak, Menciptakan sebuah produk baru selain perak yakni suasa dan Menciptakan desain-desain yang menarik sesuai dengan yang *booming* di pasaran. Sedangkan untuk bimbingan terkait teknik manajerial yakni manajemen usaha dan pelatihan pembukuan dengan tujuan, mampu memberikan inovasi dan profesionalisme kepada pengusaha kecil dengan mencatat setiap barang yang diproduksi, pemasukannya, pembagian untuk gaji karyawan dan sebagainya yang berguna untuk menghadapi situasi pasar yang berubah-ubah sedangkan untuk pelatihan desain diwujudkan melalui adanya lomba-lomba desain antar pengrajin kerajinan perak.

Dengan adanya pemberdayaan dari Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memotivasi pengrajin kerajinan perak Desa Batankrajan agar berusaha lebih baik dalam menjalankan usahanya dan bisa terus berproduksi sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu produk unggulan daerah.

d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha

1. Peningkatan Kemudahan Dalam Layanan Perijinan

Peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh banyak pelaku usaha, terutama pada usaha kecil menengah, peran pemerintah tersebut berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha terutama pada industri kecil menengah untuk mengembangkan bisnis usahanya. Peran pemerintah itu antara lain diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, subsidi bantuan finansial,

serta yang tidak kalah pentingnya adalah mempermudah pemberian izin usaha, karena dengan sudah memiliki izin usaha artinya secara legal formal usaha yang telah dimiliki oleh para pengusaha tersebut memiliki kekuatan hukum, tujuan dari pada itu adalah membantu para pengusaha atau wirausaha dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah. Seperti yang disebutkan diatas bahwasanya bentuk badan hukum suatu usaha kecil tersebut bisa berupa usaha perseorangan sampai ke perkumpulan usaha, yayasan dan lembaga.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri khususnya pada dinas perindustrian dan perdagangan guna membantu para pengrajin kerajinan perak, dinas sudah menyiapkan serta menerapkan langkah strategis untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha kerajinan perak untuk mendirikan usahanya agar memiliki kekuatan hukum, selain itu diharapkan dengan kemudahan tersebut akan mampu menarik minat masyarakat yang lainnya untuk semakin menambah jumlah usaha kerajinan perak. Kemudahan pemberian usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk menyederhanakan tata cara mekanisme pengurusan surat-surat serta persyaratan administratif yang terlalu ribet, dengan memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan mendirikan usaha kerajinan perak. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk mengurangi penganguran, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Mojokerto sebagai sentra penghasil kerajinan perak terbaik, yang tidak dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur..

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan untuk usaha kecil ini, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam konsep Usaha kecil oleh Tohar(2002:31) dikatakanya bahwa

untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil harus melalui aspek perundang-undangan serta aspek kebijakan. Salah satu aspek utama adalah perizinan usaha, yang dimaksud disini adalah penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek perizinan usaha, hal ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan antara lain, untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan sistem pelayanan satu atap. Serta memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto tersebut juga sesuai dengan konsep pada paparan diatas bahwa ada suatu kebijakan khusus yang diberikan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk para pengrajin perak agar meningkatkan iklim usaha, serta memacu agar bertambahnya wirausaha yang bergerak di bidang kerajinan perak, dengan meningkatkan layanan pada perijinan usaha bagi mereka. Hal ini secara nyata terbukti bahwa ada penambahan wirausaha khususnya di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg dari 1 orang kemudian sekarang menjadi 22 wirausaha yang kemudian telah mempunyai unit badan usaha sendiri-sendiri yang bergerak pada kerajinan perak. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peranan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, agar dapat saling memberikan simbiosis mutualisme.

2. Penguatan Kelembagaan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini tengah menghadapi fenomena paradoks. Disatu sisi UKM terlihat sangat strategis karena merupakan pilar pendukung utama dan terdepan dan pembangunan ekonomi. UKM juga paling besar dan paling cepat dalam memberikan peluang lapangan pekerjaan dan

memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat kita. Melihat begitu besarnya peran UKM maka tidak dapat disangkal semua itu karena pengusaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis yang mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian. Oleh karena besarnya potensi yang dihasilkan dari usaha kecil tersebut dalam hal ini perlu adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menumbuhkan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Banyak usaha kecil yang secara kuantitas maupun kualitas terbangun dari sumber daya manusia yang terbalik, maksudnya kuantitas yang banyak namun kualitas sangat miskin, dengan fenomena tersebut dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut, karena memang tidak selamanya kuantitas itu menjadi suatu kelemahan. Kadang kuantitas juga lebih dibutuhkan dari sekedar kualitas tetapi kecil perubahannya. Dalam konteks usaha kecil kita melihat bahwa kuantitas itu layak diperhatikan karena memang inti dasarnya usaha kecil adalah mampu mereduksi jumlah kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Peran pemerintah disini adalah mengubah kuantitas yang sekadarnya tersebut, menjadi kuantitas yang berkualitas. Usaha kecil menengah yang dalam hal ini adalah kerajinan perak adalah tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Dinas perlu mengatur serta mengendalikan usaha kerajinan perak ini agar secara kualitas orang-orang yang ada didalamnya memiliki pengetahuan, kompetensi serta keterampilan, dan mampu memberikan kuantitas untuk menambah minat seseorang untuk menjadi pengrajin kerajinan perak. Dengan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk menjadikan

usaha ini dikenal secara luas serta menjadi identitas serta produk unggulan Kabupaten akan terwujud.

Peran pemerintah terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam kapasitasnya untuk mengatur serta mengendalikan suatu usaha kecil, ini sesuai dengan konsep upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM salah satunya sebagaimana yang dikatakan oleh, Sjaifudin (1995:66-75). Bahwa upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM pada point Strategi Pengaturan dan Pengendalian, disana disebutkan tentang adanya fungsi kelembagaan untuk dinas, maksudnya Dalam hal ini instansi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan inisiatif untuk mengembangkan usaha kecil serta terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Jelas bahwa salah satu inti dari pemberdayaan yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah berinisiatif untuk mengembangkan usaha kecil tersebut agar secara jangka panjang akan dapat mengentaskan kemiskinan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut para pengrajin yang terdapat di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, membentuk lembaga yang dinamakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Majapahit Jewelry. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan agar pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan serta mengatur usaha ini secara efektif. Dalam hal ini pemerintah memberikan pelatihan, bantuan dan pemahaman terkait desain dan teknologi, dengan begitu kesulitan terkait modal, kekurangan bahan baku, tempat pemasaran dapat teratasi secara bersama-sama.

Kelompok usaha bersama ini dapat mewakili pengrajin perak untuk mendapatkan solusi mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan meminta rekomendasi dan berkonsultasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, ini juga merupakan salah satu strategi pemberdayaan dari pemerintah melalui dinas didalam upayanya untuk mengatasi permasalahan pada UKM dengan pendekatan secara kelompok. Dengan begitu setiap permasalahan akan secara cepat dapat teratasi. Strategi ini secara efektif mampu memberikan inovasi-inovasi baru kepada pengrajin perak untuk secara kelompok mengelola usahanya dengan baik sehingga kedepannya kerajinan perak ini dapat menjadi identitas dan produk unggulan Kabupaten Mojokerto yang disegani baik di lokal maupun internasional.

2. Keberdayaan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Meliputi:

Pemberdayaan perlu dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah daerah, karena pemberdayaan adalah bagian dari tugas pemerintah untuk mengatur serta mengarahkan kehidupan masyarakatnya kearah yang lebih baik. Dalam dunia usaha juga demikian perlu adanya penciptaan iklim yang harmonis untuk menumbuhkan peningkatan finansial serta ekonomi dari para pelaku usaha, utamanya pada industri kecil dan menengah. UKM yang dalam hal ini adalah difokuskan untuk menggerakkan perekonomian daerah guna mengangkat tingkat kemakmuran daerah melalui peningkatan APBD, dengan adanya otonomi daerah maka peran dari pemerintahan daerah menjadi sangat vital dan strategis, untuk mendorong dunia usaha melalui UKM dapat berkembang dengan baik.

Kabupaten Mojokerto yang dalam hal ini mengembangkan usaha kerajinan perak, yang terletak di Desa Batankrajan, Kecamatan Gedeg berupaya untuk mengembangkan kerajinan tersebut untuk banyak hal, selain untuk kebutuhan individu dalam arti peningkatan kemampuan finansial untuk kesejahteraan individu, selain itu juga untuk keperluan kebutuhan daerah, artinya kerajinan perak ini diupayakan agar mampu meningkatkan investasi daerah, membuka lapangan pekerjaan baru, serta menumbuhkan iklim usaha di daerah dengan tujuan akhir agar adanya identitas pemasaran untuk daerah terutama Kabupaten Mojokerto.

Pemberdayaan UKM yang dalam hal ini di Kabupaten Mojokerto adalah para pengrajin kerajinan perak dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Melalui bidang Bina Industri Logam, Mesin, Aneka Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET) banyak hal yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagai langkah strategis dalam pemberdayaan untuk para pengrajin kerajinan perak. Pembinaan ketrampilan SDM, pemberian alat-alat atau teknologi tepat guna yang dipakai dalam berproduksi, mengarahkan dalam pemilihan pangsa pasar, dan dengan memberikan bantuan modal usaha guna meningkatkan produksi pada sentra industri Kerajinan Perak di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini diharapkan dapat membuat industri kerajinan perak mampu berkembang, bertahan dari resistensi iklim perekonomian serta akan menciptakan produk unggulan daerah. Fokus utama dari pemberdayaan ini adalah pembinaan dan pelatihan untuk para pengrajin.

Pembinaan serta pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan, daya jelajah untuk pemasaran serta motivasi agar ada mental yang kuat dari para pengrajin untuk menjadi usahawan yang gigih dan tangguh. Artinya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah disini mendapat antusiasme yang cukup baik dari masyarakat terutama di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, karena memang pada intinya suatu pemberdayaan faktor keberhasilan harus didukung dari sinergi yang positif antara masyarakat serta pemerintah, masyarakat adalah objek dari pemberdayaan yang dilakukan, serta pemerintah adalah subjek atau pelaku dari pemberdayaan tersebut sebagai inisiatif pengembangan, pembinaan serta pemberi bimbingan untuk dunia usaha terutama yang mendukung kemanfaatan untuk daerah agar hasil serta karya yang dihasilkan mampu menguntungkan semua pihak, baik itu pemerintah sendiri, daerah maupun masyarakat secara khusus.

Prijono dan Pranarka (1996:2) mengatakan bahwa proses pemberdayaan untuk masyarakat kecil dan UKM dibagi menjadi beberapa tahap salah satunya fase atau tahap partisipatoris, fase ini diartikan sebagai proses pemberdayaan itu berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Artinya bahwa pemberdayaan itu berasal dari pemerintah kemudian dijalankan bersama oleh masyarakat, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil secara bersama-sama (keuntungan bersama) masyarakat serta pemerintah.

Pada teori ini tampak bahwa pemberdayaan itu membutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai *key factor*. *key* inisiator serta masyarakat sebagai objek untuk sama-sama memiliki peran masing-masing untuk mendorong keberhasilan pemberdayaan. Dan menurut hemat penulis pemberdayaan yang dilakukan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk para pengrajin kerajinan perak yang berfokus di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg telah menunjukkan adanya kerjasama yang positif serta penerimaan yang positif dari masyarakat sebagai pelaku usaha.

Bahwa proses pemberdayaan melalui tahap partisipatoris yang membutuhkan inisiatif serta tanggapan yang positif dari masyarakat dan pemerintah telah dilakukan dan dijalankan dengan baik di Kabupaten Mojokerto. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar secara maksimal menciptakan Peningkatan pendapatan masyarakat pengrajin, pemasaran hasil usaha, serta penciptaan lapangan pekerjaan maupun mereduksi jumlah pengangguran dengan Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kerajinan perak ini.

a. Peningkatan pendapatan masyarakat pengrajin

Pemberdayaan dari pemerintah tidak hanya difokuskan untuk membina, melatih serta membimbing saja tetapi juga diharapkan mampu mendorong para pengrajin kerajinan perak di Kabupaten Mojokerto terutama di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg untuk memperoleh manfaat dari sisi ekonomi. Adanya pameran produk yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, kemudian pembinaan melalui cara memasarkan produk agar mendapat jaringan pasar yang lebih luas, telah secara maksimal dimanfaatkan oleh para pengrajin kerajinan perak di Kabupaten Mojokerto. Fakta di Desa Batankrajan menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pengrajin dari 6-7 unit dalam satu Desa menjadi sekitar 22 unit, semakin menjamurnya jumlah pengrajin itu berkorelasi positif dengan dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Semakin besarnya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tidak lain adalah sebagai wujud agar usaha kerajinan perak yang terdapat di Kabupaten Mojokerto tersebut dapat berkembang dengan baik, berkembang untuk menumbuhkan iklim kemandirian berwirausaha, berkembang untuk menumbuhkan iklim kerja guna memperluas lapangan pekerjaan, serta berkembang sebagai identitas lokal. Terutama sebagai identitas lokal ini penting, karena dengan hal ini pemasaran hasil usaha tidak akan susah-susah untuk dipasarkan ke daerah lain. Artinya selain menguntungkan bagi para pengusaha juga akan secara positif sebagai *brand* untuk wilayah Kabupaten Mojokerto karena otomatis para konsumen akan mengetahui bahwa sentra kerajinan perak ada di Kabupaten Mojokerto.

Terbentuknya sentra kerajinan perak di Kabupaten Mojokerto ini berarti terdapat potensi lokal yang tergal di tengah-tengah masyarakat. Potensi tersebut tentunya harus mendapat dorongan dari pemerintah untuk bagaimana kemudian memaksimalkan dengan pembinaan serta bimbingan-bimbingan agar perkembangannya semakin pesat. Potensi lokal yang ada tersebut tidak akan pernah tergal dengan baik tanpa pemerintah daerah setempat. Menurut Elliot dalam (Riyadi dan Supriady, 2004:80) menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan atau *empowerment* salah satunya adalah strategi dengan pendekatan *The Welfare State*, inti dari strategi ini menyebutkan bahwa Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdayakan masyarakat dalam menghadapi proses politik, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

Jadi jelas bahwasanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah harus mampu “mengeluarkan” potensi masyarakat

dan di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto lewat bidang ILMATET, telah mampu memberdayakan para pengrajin perak dengan serangkaian pembinaan, pelatihan serta bimbingan kepada para pengrajin. Perubahan signifikan selain mulai tumbuhnya usaha ini dengan baik juga ditandai dengan bertambahnya jumlah pengrajin. Selain itu dari sudut pendapatan juga ada kenaikan secara signifikan. Data yang dihimpun dari Omset Pengrajin Kerajinan Perak Desa Batankrajan Th. 2012 menunjukkan bahwa rata-rata omset pendapatan mereka cukup tinggi dari ratusan ribu sampai puluhan juta.

Tentunya perputaran ekonomi di Desa Batankrajan ini akan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut secara umum. Adanya peningkatan pendapatan dari para pengrajin membuat produksi semakin meningkat dan berkualitas, hal ini membuat permintaan akan kerajinan perak menjadi bertambah. Otomatis dengan hal tersebut ada keuntungan secara finansial yang akan di dapat oleh para pengrajin, peningkatan secara finansial ini berpengaruh kepada kesejahteraan mereka baik secara primer maupun sekunder, kebutuhan-kebutuhan pokok dengan kesejahteraan yang baik sangat mungkin terpenuhi. Begitu pula dengan kebutuhan sekunder.

b. Pemasaran Hasil Usaha

Perhatian pemerintah harus dilakukan secara *holistic* kepada usaha kecil dan menengah, secara umum di negara kita Indonesia fakta memperlihatkan mati surinya UKM terutama disebabkan dua hal modal serta kurangnya pemasaran. Ini adalah sebuah problem klasik yang secara terus-menerus, secara turun-temurun akan selalu dihadapi para pengusaha yang bergerak pada tataran UKM. Padahal secara konkrit UKM adalah salah satu penggerak roda kehidupan ekonomi

terutama kepada kalangan menengah-kebawah, lewat UKM pula nasib jutaan masyarakat tergantung. UKM selama ini telah memberikan harapan kepada banyak masyarakat, namun sekali lagi UKM memiliki kelemahan terhadap resistensi ekonomi terutama pada sisi modal serta pemasaran produk karena rata-rata UKM hanya di bawahi dengan modal seadanya, serta pemasaran produk yang stagnan.

Oleh karena itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah, lewat pemberdayaan kepada mereka para pengusaha di bidang UKM. Begitu juga ketika kemudian kita melihat realita pada pengusaha atau pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Butuh ada keterlibatan, bantuan, uluran tangan pemerintah tidak hanya modal saja namun secara nyata di Desa ini para pengrajin lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mampu membina serta membimbing mereka kearah yang lebih baik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah memberdayakan para pengrajin kerajinan perak, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terkait pemasaran hasil usaha telah banyak diupayakan melalui kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah lain untuk menyelenggarakan pameran perhiasan yang diikuti oleh pengrajin perhiasan salah satunya pengrajin perak Desa Batankrajan, disamping itu juga diadakan pembinaan dan pelatihan penggunaan website sebagai sarana untuk memasarkan produk mereka.

Ini merupakan suatu langkah yang tepat, karena apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah sangat membantu para pengrajin kerajinan perak. Kita perlu mengingat bahwa kendala utama selain pada modal adalah pemasaran hasil usaha yang selama ini dihadapi

oleh UKM dan pengrajin kerajinan perak termasuk di dalamnya. Langkah jitu ini telah membawa dampak untuk pemasaran hasil produk yang dihasilkan oleh para pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg mampu menembus pasar internasional melalui ekspor produk. Pencapaian ini tentulah sangat mengembirakan. Karena selain mampu menembus ketatnya persaingan di pasar lokal, kerajinan perak ini juga mampu menembus pasar ekspor tentu secara mutu serta kualitas sudah tidak perlu diragukan.

Pemasaran hasil usaha yang dilakukan lewat pemberdayaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto secara signifikan sangat membantu para pengrajin, dalam tataran ini dinas melalui delegasinya dari Bidang ILMATET memberikan pengetahuan serta pemahaman bagaimana mengembangkan usaha dimulai dari pelatihan website, desain produk. Sehingga jaringan pemasaran terbuka secara lebar, lewat media internet tentu sangat mudah untuk diketahui semua orang diseluruh dunia apalagi orang lokal karena kita semua tahu indonesia adalah konsumen internet terbanyak di Dunia.

Selain ada pelatihan untuk memperluas pemasaran melalui jaringan Internet, Dinas juga mengupayakan cara lain dengan membuka kerja sama dengan daerah lain guna mengadakan pameran produk hasil usaha. Tentunya sangat bermanfaat program ini untuk hasil kerajinan perak Desa Batankrajan supaya diketahui oleh daerah lain. Jadi para pengrajin tidak perlu bersusah-susah untuk mempromosikan hasil kerajinan mereka.

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto ini berarti bagaimana kemudian mereka berusaha memberdayakan masyarakat pengrajin untuk bisa memanfaatkan peluang, mengembangkan kreatifitas, serta mengembangkan produksi usaha. Dalam teori

strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Tambunan (2000:81) pada point ketiga bahwa pemberdayaan usaha industri kecil adalah melalui Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan *entepreneurship* dan kemampuan penguasaan teknologi.

Maksud dari pada konsep ini mengaris bawahi bahwa strategi pemberdayaan salah satu target utamanya adalah penguatan sumber daya manusia, peningkatan jiwa wirausaha serta kemampuan penguasaan teknologi. Melihat fakta apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan melakukan pembinaan, pengarahan melalui pelatihan website, desain grafis serta pameran produk adalah integrasi untuk mengembangkan penguasaan teknologi, penguatan kreativitas untuk penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan jiwa wirausaha. Kita semua tentunya menyadari bahwa masyarakat desa baik itu di Desa Batankrajan maupun di desa-desa yang lain tentu sangat terbantu dengan berbagai pelatihan, pembimbingan serta pembinaan ini terutama pelatihan internet, bagaimana tidak karena secara nyata masyarakat desa telah diidentikan gagap teknologi. Usaha-usaha ini secara signifikan akan membantu terutama untuk pemasaran produk bagi mereka masyarakat pengrajin di Desa Batankrajan karena berbagai hal tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto memang diarahkan kesana, membuka peluang pemasaran yang lebih luas dengan jangkauan target pasar internasional.

Hasil dari program yang dilakukan dinas telah mampu dipetik masyarakat pengrajin dengan meluasnya pemasaran produk usaha mereka, dari pasar lokal yang sulit dijangkau seperti NTT, NTB, Sulawesi, Papua berlahan-lahan telah

berhasil dijangkau, bahkan pasar Internasional juga dijelajahi seperti apa yang dilakukan oleh Perusahaan Agung Silver yang 10% produk mereka mampu menembus pasar ekspor.

c. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap

Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah banyaknya pengangguran, pengangguran disebabkan oleh ketimpangan antara kesempatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan. Fenomena ini lazim sekali di negara kita, masih tingginya tingkat pengangguran baik itu dari tenaga kerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik memiliki kecenderungan hampir sama. Karena memang keseimbangan tidak tercipta terutama pada jumlah lapangan pekerjaan.

Orientasi klasik dari banyak masyarakat Indonesia adalah menjadi pegawai negeri artinya mereka sebagai “penunggu lapangan pekerjaan” , dengan asumsi ini tentu akan tercipta suatu titik persaingan yang sangat ketat terhadap hal ini, bisa dibayangkan dengan jumlah orang diusia kerja di Indonesia yang sangat banyak, hanya fokus untuk menjadi pegawai negeri, tentunya akan menyebabkan banyak angkatan kerja tidak akan tertampung semuanya. Imbasnya adalah pengangguran.

Disini berarti diperlukan suatu strategi khusus bahwasanya harus ada pemahaman, pengarahan, bimbingan, serta dorongan dari pemerintah untuk bagaimana kemudian angkatan kerja ini tidak hanya menjadi seorang PNS saja, melainkan harus mampu mandiri, menjadi seorang wirausaha. Diperlukan suatu keberanian dan tentunya dorongan dari pemerintah untuk menciptakan keberhasilan dibidang ini. Wirausaha terutama pada UKM sangat berguna untuk mereduksi jumlah pengangguran di Negeri kita, karena mereka didorong untuk secara mandiri menghidupi kehidupannya dan usahanya.

Demikian juga apa yang kemudian kita lihat di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, UKM melalui kerajinan perak yang sejak berdirinya usaha ini dari tahun 1987 telah mampu mereduksi pengangguran sampai 80%. Di Desa Batankrajan kerajinan perak ini adalah suatu alternatif untuk menampung angkatan kerja terutama lulusan SMA yang kebanyakan ada di Desa ini. Selain itu kerajinan ini adalah suatu alternatif lapangan pekerjaan karena dari sektor lain seperti pertanian sudah tidak bisa secara masal menyerap tenaga kerja.

Keberadaan industri kerajinan perak Desa Batankrajan ini dianggap masyarakat setempat telah mampu memberikan lapangan kerja baru. Kesempatan kerja dalam industri kerajinan perak ini dapat berupa menjadi tenaga kerja dapat juga ikut mengembangkan menjadi pengrajin juga.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga secara aktif membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memaksimalkan bidang ini. Ada peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto sebagai fasilitator melalui TPL (tenaga pelatihan lapangan) berkoordinasi dengan pengrajin untuk memberikan motivasi dan mendidik anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan agar bisa menjadi pengrajin yang inovatif dan kreatif.

Peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah salah satu upaya strategi memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk secara konsisten dapat menyerap tenaga kerja dengan mengembangkan jiwa *entrepreneurship* melalui kerajinan perak. Asumsi teoritis ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tambunan (2000:81) terkait dengan strategi yang konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil atau usaha kecil menengah. Pada point ketiga dari strategi tersebut dikatakan bahwa, Penguatan sisi permintaan

melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan entrepreneurship dan kemampuan penguasaan teknologi.

Artinya pemerintah utamanya disini adalah pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memberikan penguatan sumber daya manusia serta peningkatan *entrepreneurship*, seperti yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Batankrajan para pengrajin kerajinan perak telah diberikan pembinaan, pelatihan serta bimbingan dalam rangka mengembangkan skill serta kreatifitas serta motivasi untuk menguatkan jiwa usaha mereka. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini secara kongkrit telah mampu mengembangkan usaha kerajinan perak ini sampai menembus pasar global, hal tersebut juga berkorelasi dengan adanya penambahan penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran dapat direduksi terutama di Desa Batankrajan hampir 80% pengangguran dapat terserap oleh usaha kerajinan perak ini. Dengan fakta tersebut membuktikan bahwa secara nyata peran pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan pengrajin untuk meningkatkan hasil usaha serta kualitas usaha untuk menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran terutama di daerah telah secara efektif tercapai.

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kerajinan perak agar mampu menjadikan perak sebagai produk unggulan daerah.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dalam hal ini lewat bidang ILMATET, secara praktis telah membantu para pengrajin kerajinan perak dalam hal peningkatan finansial, pengembangan usaha, dan pemasaran usaha. Perkembangan dari kerajinan perak

tersebut secara signifikan telah mampu menembus pasar global, secara efektif pula telah mampu menyerap tenaga kerja terutama dari Desa setempat. Banyak faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat dari pelaksanaan pemberdayaan tersebut. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan ini adalah sebagai wujud perhatian serta dorongan bagi UKM khususnya untuk kerajinan perak agar mampu menjadi produk unggulan daerah serta menjadi identitas daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mempengaruhi baik itu secara positif maupun negatif, secara positif adalah bagaimana kemudian peran pemerintah ini menjadi pendorong bagi usaha kecil menengah yaitu pengrajin kerajinan perak untuk mengembangkan usahanya dan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut mampu secara efektif dan signifikan mempengaruhi usaha kerajinan perak tersebut. Secara negatif hal tersebut dimaknai bahwa belum berjalannya peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga disebabkan faktor-faktor yang ada baik itu secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak menghambat para pengrajin untuk mengembangkan usaha tersebut.

Secara positif ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pemberdayaan kepada pengrajin kerajinan perak di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg. Diantaranya adalah:

1. Faktor Pendukung

a. Tenaga Kerja Yang Cukup Banyak

Pelaksanaan dari pengembangan usaha kerajinan perak ini tentunya tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak disokong oleh potensi dari sumber

daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas memang masih perlu lagi adanya peningkatan karena memang banyak aspek yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap hal ini terutama kualitas pendidikan. Dalam hal ini dukungan ada pada kuantitas dari sumber daya manusia di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi industri kerajinan perak selain tidak perlu susah-susah mencari tenaga kerja dari luar desa, juga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Batankrajan itu sendiri.

Tersedianya sumber daya manusia adalah potensi tersendiri di Desa Batankrajan lewat peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto perbaikan kualitas juga tersentuh, banyak hal telah dilakukan mulai dari pembinaan, pelatihan, sampai kepada pengembangan kreatifitas untuk membangun iklim usaha yang mandiri dan berkualitas. Potensi ini memang harus dimanfaatkan baik itu oleh para pengrajin serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Dalam teori tahap-tahap pemberdayaan menurut Kartasmita (1996:74) bahwasannya pemberdayaan itu sendiri dilakukan melalui 3 arah, salah satu pointnya adalah pemerintah bersama-sama masyarakat harus mampu Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.

Fakta mengatakan bahwa masyarakat Desa Batankrajan adalah di dominasi oleh angkatan kerja, peluang ini kemudian diserap oleh usaha kerajinan perak di Desa tersebut. Lebih dari 80% mereka yang menganggur mampu

diarahkan untuk menjadi pengrajin. Pemerintah juga tidak tinggal diam banyaknya potensi terutama kuantitas sumber daya manusia mendorong pemerintah untuk membatu sentra usaha kerajinan perak mengembangkan produksinya lewat pelatihan serta pembinaan secara berkala dan motivasi untuk menambah antusiasme masyarakat untuk kerajinan ini. Sehingga baik secara kualitas maupun kuantitas sudah terpenuhi untuk meningkatkan usaha kerajinan perak ini di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg.

b. Masih Belum Banyak Pesaing yang Memiliki Usaha yang Sama

Keberhasilan suatu usaha sangat tergantung dari iklim persaingan yang dihadapi. Secara positif iklim persaingan akan meningkatkan kemampuan para pengusaha, para pelaku UKM, para pengrajin untuk selalu meningkatkan kualitas dari pada produk yang dihasilkan. Karena apabila mereka tidak meningkatkan mutu (*output*) maka mereka akan kalah dengan produk yang lainnya.

Namun yang menjadi unik disini adalah kerajinan perak di Desa Batankrajan adalah satu-satunya unit usaha kecil menengah yang bergerak dibidang kerajinan logam terutama perak yang terdapat di Kabupaten Mojokerto, artinya usaha ini adalah satu-satunya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Guna mengembangkan usaha ini agar jadi potensi daerah yang unggul maka diperlukan suatu pemberdayaan dari pemerintah daerah setempat terutama melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto untuk melindungi dan membantu usaha ini, karena memang ada potensi besar dari kerajinan ini, selain untuk mempromosikan Kabupaten Mojokerto untuk daerah lain, manfaat internal juga didapat karena usaha ini adalah padat karya jadi ada banyak tenaga kerja yang tertampung oleh kerajinan ini. Artinya memang harus dibutuhkan pemberdayaan dari pemerintah setempat usaha ini adalah penggerak bagi rakyat

yang ada dilapisan bawah agar memiliki peluang untuk menaikkan derajat secara ekonomi maupun kehidupan yang lebih baik.

Dalam konsep tahap-tahap pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996:74) pada point ketiga disebutkan bahwasannya Memberdayakan itu mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemikiran kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Pada point diatas kita mengambil makna secara tersirat bahwa pemberdayaan itu dilakukan untuk membuat masyarakat itu berdaya, melindungi, mengarahkan mereka agar ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan perekonomian bagi mereka. Dalam konteks kerajinan perak yang ada di Desa Batankrajan, hal ini tentunya sangat berelasi dengan konsep diatas bahwa tidak adanya persaingan usaha secara positif harus bisa dimaksimalkan oleh masyarakat setempat untuk mengangkat usaha kerajinan ini agar dikenal secara luas. Dukungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto agar potensi industri kerajinan perak ini diminati dan memiliki jangkauan pasar yang luas, karena industri ini belum banyak memiliki pesaing dari wilayah lain adalah suatu keharusan utama, sangat penting bagi pemerintah daerah memberdayakan masyarakat pengrajin utamanya untuk tujuan promosi

daerah serta pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah dengan mengembangkan usaha kerajinan perak yang jelas-jelas tidak banyak terdapat di daerah lain.

2. Faktor Penghambat

a. Mahalnya Harga Bahan Baku

Mati maupun hidupnya suatu usaha sangat bergantung kepada tingkat produktifitas serta kualitas usaha tersebut, jika produktifitas tinggi dengan dibarengi kualitas yang tinggi pula maka tentu eksistensi usaha akan semakin diakui dan berkembang dengan baik, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya ancaman terbesarnya adalah mandeknya usaha tersebut, bila hal tersebut terjadi banyak hal yang akan dirugikan selain tentunya pemilik usaha, tenaga kerja juga akan menerima imbasnya.

Salah satu hal yang mempengaruhi produktifitas dan mutu suatu usaha adalah ketersediaan bahan baku, semakin mudah dan murah bahan baku yang didapat tentu akan berkorelasi positif dengan perkembangan usaha. Namun bila bahan bakunya sulit imbasnya terhadap usaha juga akan berpengaruh, seperti harga yang melambung tinggi dampaknya nanti pada larinya konsumen, pengurangan kualitas juga akan menyebabkan antusias dari konsumen menurun. Dampak paling buruk adalah kebangkrutan usaha.

Pada usaha kerajinan perak yang terdapat di Desa Batankrajan ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah mahalnya harga bahan baku yaitu perak, karena fluktuasi harga juga mengikuti perkembangan atau imbas kenaikan maupun penurunan kurs dolar, tentu hal ini sangat menyulitkan bagi para masyarakat pengrajin di Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg. Hal ini memang sesuai dengan

apa yang menjadi salah satu karakteristik usaha kecil menengah, bahwa karakteristik Usaha Kecil adalah Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

Apa yang ada pada kerajinan perak di Desa Batankrajan juga demikian walaupun secara umum pemasaran telah berkembang namun tidak semua pengrajin memperolehnya, secara klasik memang jangkauan pemasaran, modal serta bahan baku adalah kendala utama yang harus dihadapi untuk mengembangkan usaha ini.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kerajinan perak yang terdapat di Desa Batankrajan ini mayoritas para pekerjanya adalah mereka yang lulusan SMA yang terdapat di daerah sekitar Desa Batankrajan Kecamatan Gedeg, yang tentunya belum memiliki pengalaman. Para pekerja hanya mengandalkan keahlian secara otodidak, dari latarbelakang ini pula kesulitan kerap muncul dan menjadi hambatan di dalam pemberian pembinaan serta bimbingan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Banyaknya tenaga kerja memang benar adanya, namun secara kualitas belum banyak diantara mereka yang memenuhi kriteria, karena memang yang paling dibutuhkan adalah adanya tenaga kerja maka para pemilik juga tidak berfikir untuk merekrut tenaga kerja dari daerah lain, mereka hanya memanfaatkan sumber daya manusia seadanya yang terdapat di sekitar Desa Batankrajan.

Oleh karena itu kerap kali dalam memberikan pemahaman dilapangan petugas dari Dinas harus secara detail serta penuh kesabaran harus mengarahkan serta membimbing pelatihan-pelatihan untuk pengembangan usaha mulai dari

dasarnya. Maka ketika kita tarik pada konsep teori tentang hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UKM seperti yang dikemukakan oleh Jafar (2004:41), pada salah satu point tentang faktor internal sebagai kendala pada UKM adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia, disana disebutkan bahwasanya sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Artinya sangat jelas bahwa keterbatasan akan SDM terutama pada kerajinan perak di Desa Batankrajan ini akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, kreatifitas usaha, serta peluang untuk memasarkan produk karena kekurangan akan cara mendapatkan informasi-informasi yang baru serta penguasaan akan teknologi yang lebih modern, ini secara natural akan menghambat perkembangan usaha kerajinan, karena sumber daya manusia adalah penunjang paling vital bagi keberlanjutan suatu usaha.

c. Terbatasnya Modal

Menurut Jafar (2004:41), salah satu hambatan atau kendala berikutnya yang dihadapi oleh usaha kecil adalah kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan, padahal modal ini adalah merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan

UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Pada permasalahan untuk Desa Batankrajan juga demikian, kesulitan finansial yang dihadapi oleh para masyarakat pengrajin kerajinan perak kerap menjadi kendala untuk mengembangkan maupun memperluas usaha ini, walaupun memang akses-akses serta bantuan modal melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah disediakan, melalui pinjaman dari Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas. Namun pada prakteknya bunga pada pinjaman di Bank juga cukup memberatkan masyarakat pengrajin di Desa Batankrajan, akhirnya mereka hanya mengandalkan modal sendiri.

Hal tersebut tentu berpengaruh kepada kuantitas produksi, dengan terbatasnya modal artinya bahan baku yang di dapatkan juga relatif kecil, karena bahan baku yang banyak juga membutuhkan modal yang besar pula. Dengan demikian banyak dari para pengrajin yang menolak serta tidak bisa memenuhi kuota permintaan terhadap pesanan dari konsumen kerajinan perak. Dengan pemenuhan pesanan seadanya keuntungan juga relatif sedikit, perputaran akan perkembangan kenaikan ekonomi untuk masyarakat juga stagnan karena memang tidak ada modal dalam jumlah yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Basrowi, & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daryanto, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo
- Hadi, Agus Purbathin. 2006. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Agribisnis / Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)
- Jimung, Martin, Msi. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Cides
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: YKPN
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang : Bayu Media
- Nazir, Mohamad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pranarka AMW dan Prijono, Onny S (Ed). 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusuma. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi* Alih bahasa: Jusuf Udaya Lic, Ec. Jakarta: Arcan
- Singarimbun, M dan Efendi, S. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Sjaifudin, Hetifah. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akatiga

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata

Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

Takdir, Muhammad. 2012. *Nasionalisme dalam Bingkai Pluralitas Bangsa:Paradigma Pembangunan & Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Tambunan, Tulus. 2000. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta : Salemba Empat

Tohar, M. 2002. *Membuka Usaha Kecil*. Jakarta : Kanisius

Triyuwono, Iwan dan Ahmad Erani Yustika.2003. *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*. Malang: Bayumedia

.....2011, BPS Kabupaten Mojokerto Dalam Angka.

.....2013, Desa Batakrajan Dalam Angka

.....2012, KUB Majapahit Jewelry

.....2011, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto

.....2013, RKPD Kabupaten Mojokerto.

Sumber Dari Internet:

Anonymous, *Kontribusi UKM terhadap PDB*, artikel diakses dari internet dengan alamat website: ekonomi.kompasiana.com/ pada hari jumat, 18 januari 2013 pukul 21.30 WIB.

Anonymous, *Organisasi Perangkat Daerah*, Artikel diakses dari internet dengan alamat website : <http://www.wikipedia.org/> pada hari Jumat, 18 januari 2013. Pukul 21.45 WIB

Anonymous, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan*, Artikel diakses dari internet dengan alamat website : www.mojokertokab.go.id / pada hari jumat 19 januari 2013 pukul 12.00 WIB

Eko Dermawan. 2011. <http://kpmbwi.blogspot.com/2012/08/akar-penyebab-dan-permasalahan.html> diakses pada hari senin 23 Desember 2013 Pukul 21.00 WIB

Hafsah, Mohammad Jafar. 2004. “ *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah*” Infokop No. 25 Tahun XX, diakses dari internet dengan alamat website

: <http://www.google.co.id/search?=bentuk+pembinaan+industri+kecil+menengah> diakses pada hari kamis 14 februari 2013 pukul 12.00 WIB.

[www.Nasional.kompas.com/read/ bahan baku kerajinan perak/](http://www.Nasional.kompas.com/read/ bahan+baku+kerajinan+perak/) diakses pada hari kamis 14 februari 2013 pukul 10.00 WIB.

[www.Rocana.kemenperin.go.id/30 Januari 2013/](http://www.Rocana.kemenperin.go.id/30+Januari+2013/)“pelaksanaan kebijakan industri di jatim” diakses pada hari 20 Juni 2013 pukul 20.00 WIB.

Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 Tentang Bidang / Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.

Peraturan Bupati No 55 Tahun 2008 Tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah